



KOMINFO

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
JL. PA TIMURA No. 92 TELP. (0321) 879913
JOMBANG - 61418

LKjIP TAHUN 2021

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KABUPATEN JOMBANG



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Bupati R. Soedirman Nomor 92 Jombang 61419
Telp. 0321879913 Fax. 0321 879913 Email: diskominfo@jombangkab.go.id
Website: kominfo.jombangkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Nomor : 188/ 4 /415.23/2022

TENTANG

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJI) PADA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN JOMBANG
TAHUN 2022**

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Menimbang: Bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka perlu untuk menetapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang dalam keputusan Kepala Dinas Komunikas Dan Informatika Kabupaten Jombang.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 4) Sebagaimana telah diubah dengan nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
3. Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentan Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata Cara penyusunan, Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara. Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Nomor 4817);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang sistem Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang pedoman Evaluasi atas Implementasi system Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat Daerah Kabupaten Jombang;
9. Peraturan Bupati Jombang Nomor 25 tahun 2020 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi serta tata kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang Tahun 2021;

KEDUA : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang Tahun 2021 telah menggambarkan anatara lain:

1. Pertanggungjawaban atas alokasi anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang dalam rangka capaian kinerja dan anggaran atas pelaksanaan program dan kegiatan yang disusun sesuai Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra) dan Perjanjian Kinerja Tahun 2021;
2. Pencapaian sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang dengan menyajikan

informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai berdasarkan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Sasaran sebagaimana dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang Tahun 2018-2023;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal : 03 Januari 2022

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
KABUPATEN JOMBANG**



BUDI WINARNO, S.T., M.Si.

Pembina Tk. I

NIP. 19741001 199901 1 001

Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr.Kepala BAPPEDA Kab. Jombang
2. Sdr.Inspektur Kab. Jombang
3. Kepala Bagian Organisasi

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN	3
A. Latar Belakang	3
B. Maksud dan Tujuan	3
C. Landasan Hukum	4
D. Tugas dan Fungsi Organisasi.....	5
D.1. Tugas Pokok	5
D.2. Fungsi	5
E. Mandat dan Peran Strategis	6
E.1. Faktor Internal	8
E.2. Faktor Eksternal	8
E.3. Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika	8
F. Sistematika Laporan	14
BAB II PERENCANAAN KINERJA	16
A. Rencana Strategis	16
A.1. Visi dan Misi	16
A.2. Tujuan dan Sasaran	17
A.3. Rencana Kerja Tahunan	19
B. Rencana Kerja	22
C. Perjanjian Kinerja	31
D. Pengukuran Kinerja	35
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	38
A. Capaian Kinerja Organisasi	38
B. Realisasi Anggaran	75
BAB IV PENUTUP	80
Lampiran – Lampiran	
1). Perjanjian Kinerja	
2). Rencana Aksi	
3). Pengukuran Kinerja	

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya kepada kami, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang Tahun 2021 ini dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang Tahun 2021 ini disusun sebagai laporan pertanggungjawaban kepada Kepala Daerah dan kepada masyarakat atas pelaksanaan program dan kegiatan selama satu tahun Anggaran 2021. Dokumen ini memuat informasi tentang pelaksanaan seluruh kegiatan yang dilaksanakan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran 2021. Sesuai dengan kedudukan Dinas Komunikasi dan Informatika yang mempunyai tugas pokok dan fungsi serta tanggungjawab sebagai pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian melalui misi Pemerintah Kabupaten Jombang Nomor 1 "***Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih dan Profesional***" dalam rangka mewujudkan Jombang yang ***Ber karakter dan Berdaya Saing***.

Laporan Kinerja ini merupakan laporan kinerja dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang selama kurun waktu 1 (satu) tahun berdasarkan program dan kegiatan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang. Laporan ini sangat dibutuhkan dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kinerja pemerintahan dan pembangunan. Dengan demikian semoga kebutuhan tersebut dapat terpenuhi dengan adanya laporan ini.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Jombang, Januari 2022

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN JOMBANG**



BUDI WINARNO, ST, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19741001 199901 1 001

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan agar berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta sebagai upaya untuk mewujudkan *good governance* perlu membentuk suatu siklus akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang dilaksanakan secara terus menerus. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Maka seluruh instansi pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah diwajibkan untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja sebagai wujud pertanggung jawaban instansi pemerintah dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi. Tujuan dari dilaksanakan sistem pertanggung jawaban (akuntabilitas) kinerja adalah dalam rangka mewujudkan pemerintah yang baik dan terpercaya.

Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan *legitimate* sehingga tercipta pemerintahan yang bersih dan mampu menyediakan *public goods and services* sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat responsif, demokratis, memberdayakan masyarakat partisipatif, bersih dan bebas korupsi serta berorientasi pada sistem dan mekanisme pasar.

Terselenggaranya *good governance* (pemerintahan yang baik) merupakan prasyarat utama dalam mewujudkan aspirasi masyarakat untuk mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara. Dalam rangka implementasinya diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban (akuntabilitas) yang jelas, tepat dan nyata dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Melaksanakan akuntabilitas kinerja sebagai wujud pertanggungjawaban dari keseluruhan pelaksanaan tugas-tugas menyusun perencanaan strategis yang memuat visi dan misi organisasi, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai serta strategis pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

LKJIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi OPD selama kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran dalam mencapai tujuan/sasaran strategis

instansi. Penyusunan LKJIP juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi. Tujuan penyusunan LKJIP yaitu :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi Pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

C. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

15. Peraturan Bupati Kabupaten Jombang Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang.

D. TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang merupakan salah satu unsur pelaksana Urusan Pemerintahan Daerah yang meliputi Bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang Statistik dan Bidang Persandian. Hal ini berdasarkan Peraturan Bupati Jombang Nomor 25 Tahun 2020.

Dinas Komunikasi dan Informatika adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Komunikasi dan Informatika mulai berdiri awal tahun 2017 yang merupakan gabungan dari beberapa Satuan Kerja yang membidangi komunikasi, informasi, telematika, kehumasan, statistik dan persandian.

Dinas Komunikasi dan Informatika Jombang mempunyai kewenangan dalam perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi, penyelenggaraan fungsi-fungsi pelaksana urusan pemerintahan daerah, pembinaan penyelenggaraan fungsi-fungsi pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian.

D.1. Tugas Pokok

Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian.

D.2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan di bidang hubungan masyarakat komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang hubungan masyarakat komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang hubungan masyarakat komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas Komunikasi dan Informatika;
- e. Penyelenggaraan fungsi-fungsi pelaksana urusan pemerintah daerah dibidang

hubungan masyarakat komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;

- f. Pembinaan penyelenggaraan fungsi-fungsi pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang hubungan masyarakat komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian; dan
- g. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

D.3. Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang memiliki struktur organisasi sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Aset;
 - c. Sub Bagian Penyusunan Program dan Evaluasi.
3. Bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik
 - a. Seksi Pengelolaan Informasi Publik;
 - b. Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik;
 - c. Seksi Hubungan Masyarakat.
4. Bidang Aplikasi Informatika
 - a. Seksi Infrastruktur, Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 - b. Seksi Pengembangan Aplikasi dan Ekosistem e-Government; dan
 - c. Seksi Tata Kelola e-Government.
5. Bidang Statistik dan Persandian
 - a. Seksi Statistik Sektoral;
 - b. Seksi Pengelolaan dan Evaluasi Data;
 - c. Seksi Persandian.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang memiliki komposisi pegawai sebagai berikut :

- Pejabat eselon II : 1 orang
- Pejabat eselon III : 4 orang
- Pejabat eselon IV : 12 orang
- Staf PNS : 18 orang
- Staf Non PNS : 21 orang

E. MANDAT DAN PERAN STRATEGIS

Kemajuan teknologi Informasi yang sangat pesat sehingga menghasilkan suatu revolusi teknologi baru, yaitu suatu teknologi serbaguna (*general purpose technology*)

yang berpengaruh terhadap teknologi-teknologi lain serta menyebabkan perubahan tatanan yang cukup mendasar dalam kehidupan bersosial, berbudaya, berbisnis dan berpolitik-bernegara. Teknologi ini masih berkembang pesat dan dipercaya belum kelihatan titik jenuhnya dalam beberapa dekade mendatang.

Perkembangan tersebut sangat menggembirakan karena kemampuannya yang semakin meningkat drastis justru diikuti dengan harganya yang semakin turun drastis juga. Dengan demikian pemanfaatannya menjadi semakin layak dan semakin jauh merasuki kegiatan manusia dan organisasi, mengubah pola kehidupan dan pola kerja, memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, dan mempengaruhi tatanan sosial.

Teknologi Informasi yang sebenarnya merupakan suatu perpaduan sejumlah teknologi, telah memungkinkan terjadinya *internetworking* yang menyebabkan faktor jarak dan waktu menjadi kurang berarti. Informasi dapat mengalir dari satu tempat ke tempat yang lain dengan kecepatan Cahaya. Melalui *internetworking* informasi dapat disebarkan secara gencar untuk membentuk opini publik secara global terhadap suatu tindakan yang akan dan telah dilakukan untuk menghasilkan manfaat yang sepenuhnya dikendalikan oleh penyebar informasi.

Teknologi Informasi telah membawa dunia menuju era informasi, dimana informasi yang dikelola dan dikomunikasikan dengan baik akan dapat memberikan manfaat yang sangat besar bagi yang melakukannya. Sejalan dengan perkembangan teknologinya, peran komunikasi massa menjadi semakin dominan dalam usaha mencerdaskan dan memberdayakan masyarakat, membentuk opini publik, dan menjalankan fungsi-fungsi demokrasi dalam bernegara.

Komunikasi massa memiliki peran strategis sebagai komplemen dari teknologi informasi yang banyak berperan pada tingkat teknis. Dengan demikian teknologi informasi dan komunikasi massa menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam usaha mengelola informasi untuk mewujudkan masyarakat berbasis pengetahuan sebagai syarat untuk memenangkan persaingan global.

Secara terstruktur, lingkungan strategik dimaksud berupa lingkungan internal organisasi yang terdiri dari dua faktor strategik, yaitu kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*) serta berupa lingkungan eksternal organisasi yang terdiri dari atas dua faktor strategik, yaitu peluang (*opportunity*) dan ancaman / tantangan (*threat*).

Faktor-faktor kunci keberhasilan (*critical success factors*) merupakan faktor-faktor yang sangat penting dalam mewujudkan keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, dan bahkan perumusan tujuan organisasi, dan bahkan perumusan tujuan organisasi haruslah memperhatikan keberadaan faktor-faktor kunci keberhasilan tersebut. Identifikasi terhadap lingkungan strategik Dinas Komunikasi

dan Informatika Kabupaten Jombang menghasilkan faktor-faktor strategik sebagai berikut :

E.1. FAKTOR INTERNAL

a. Kekuatan :

1. Mempunyai perencanaan dan mekanisme program kerja serta jadwal kegiatan yang jelas;
2. Sebagai mediator komunikasi / informasi pemerintah kabupaten dengan masyarakat;
3. Mempunyai sarana dan prasarana komunikasi, informasi, melalui *website*, media cetak dan media elektronik;
4. Jumlah Pegawai yang cukup banyak.

b. Kelemahan

1. Kualitas pegawai kurang kreatif dan rendahnya tenaga terdidik bidang komunikasi, informasi, persandian dan statistik;
2. Kurangnya jiwa profesionalitas dalam pembagian kerja;
3. Sistem koordinasi belum maksimal;
4. Jumlah sumber daya manusia yang tidak memadai;
5. Kurangnya pemahaman tugas yang diemban;

E.2. FAKTOR EKSTERNAL

a. Peluang

1. Peraturan Bupati Kabupaten Jombang Nomor 25 tahun 2020;
2. Peran aktif dan komunikasi masyarakat;
3. Adanya kesempatan peningkatan kualitas / sumber daya manusia pegawai melalui jenjang yang lebih tinggi (S1, S2), kursus ketrampilan bidang komunikasi dan informasi.
4. Adanya kerjasama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur dan Kementerian Komunikasi dan Informatika.
5. Adanya sarana prasarana yang cukup untuk mendukung kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika

b. Tantangan / Ancaman.

1. Tuntutan masyarakat tentang keterbukaan semakin meningkat dan persaingan bidang komunikasi semakin kompetitif;
2. Seringnya pergantian / penambahan peraturan dalam pelaksanaan;
3. Pelayanan informasi terpadu yang masih kurang optimal;

E.3. ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI

Dalam menjalankan peran strategis di atas, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang mempunyai susunan organisasi yang terdiri :

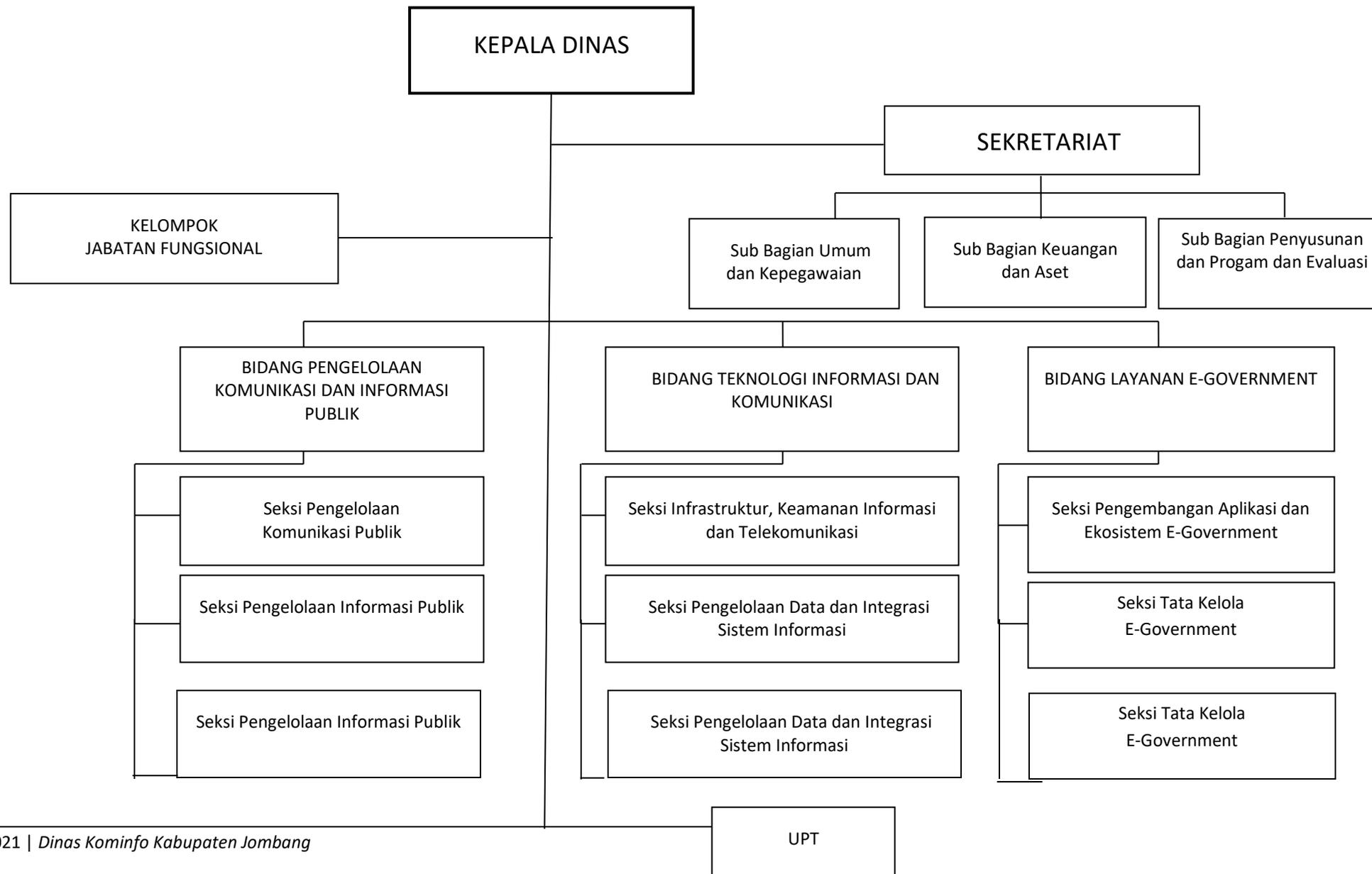
- a. Sekretariat, yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Komunikasi dan Informatika dalam merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan aset, penyusunan program dan evaluasi. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Sekretariat mempunyai fungsi :
 1. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
 2. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
 3. Pengelolaan administrasi keuangan;
 4. Pengelolaan administrasi perlengkapan;
 5. Pengelolaan urusan rumah tangga;
 6. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran, dan perundang-undangan;
 7. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang;
 8. Pengelolaan kearsipan;
 9. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana; dan
 10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.
- b. Bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Komunikasi dan Informatika di bidang pengelolaan komunikasi publik, pengelolaan informasi publik dan bidang hubungan masyarakat. Untuk melaksanakan tugas:
 1. Perumusan kebijakan di bidang penyediaan konten lintas sektoral, bidang hubungan masyarakat dan pengelolaan media komunikasi publik, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik, penyediaan akses informasi, pengelolaan opini dan aspirasi publik, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan daerah, serta pelayanan informasi kebijakan Pemerintah Daerah dan Informasi Publik;
 2. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyediaan konten lintas sektoral, bidang hubungan masyarakat dan pengelolaan media komunikasi publik, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik, penyediaan akses informasi, pengelolaan opini dan aspirasi publik, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan daerah, serta pelayanan informasi publik;
 3. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyediaan konten lintas sektoral, bidang hubungan masyarakat dan pengelolaan media komunikasi publik, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik,

- penyediaan akses informasi, pengelolaan opini dan aspirasi publik, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan daerah, serta pelayanan informasi kebijakan Pemerintah Daerah dan Informasi Publik;
4. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik, penyediaan akses informasi, pengelolaan opini dan aspirasi publik, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan daerah, serta pelayanan informasi publik;
 5. Penyiapan informasi dan komunikasi serta pelaksanaan kegiatan pembinaan terhadap kelompok komunikasi sosial masyarakat;
 6. Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan pelayanan dan penyampaian informasi melalui penerbitan (media cetak) radio, televisi dan film;
 7. Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dalam pelaksanaan program dan kegiatan penyampaian informasi dan komunikasi dengan media informasi baik pada Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Daerah lembaran pers daerah, maupun unsur masyarakat umum;
 8. Penyiapan data dan pelaksanaan kegiatan liputan, pemberitaan, pengumpulan informasi dan pendokumentasian serta komunikasi;
 9. Penyelenggaraan penyiaran melalui radio Pemerintah Daerah;
 10. Pelaksanaan hak jawab dan hak koreksi serta pelaporan segala bentuk media informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 11. Pelaksanaan tugas sebagai juru bicara Pemerintah Daerah;
 12. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
- c. Bidang Aplikasi Informatika mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Komunikasi dan Informatika di bidang infrastruktur, teknologi informasi dan komunikasi, pengembangan aplikasi, ekosistem dan tata kelola e-Government mempunyai fungsi :
1. Perumusan kebijakan di bidang infrastruktur, teknologi informasi dan komunikasi, pengembangan aplikasi, ekosistem dan tata kelola e-Government;
 2. Pelaksanaan kebijakan di bidang infrastruktur, teknologi informasi dan komunikasi, pengembangan aplikasi, ekosistem dan tata kelola e-Government;

3. Menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang infrastruktur, teknologi informasi dan komunikasi, pengembangan aplikasi, ekosistem dan tata kelola e-Government;
 4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang infrastruktur, teknologi informasi dan komunikasi, pengembangan aplikasi, ekosistem dan tata kelola e-Government;
 5. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang infrastruktur, teknologi informasi dan komunikasi, pengembangan aplikasi, ekosistem dan tata kelola e-Government;
 6. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.
- d. Bidang Statistik dan Persandian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Komunikasi dan Informatika di bidang statistik dan persandian untuk keamanan informasi mempunyai fungsi :
1. Perumusan kebijakan di bidang statistik dan persandian untuk pengamanan informasi;
 2. Pelaksanaan kebijakan di bidang statistik dan persandian untuk pengamanan informasi;
 3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang statistik dan persandian untuk pengamanan informasi;
 4. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervise dibidang statistik dan persandian untuk pengamanan informasi;
 5. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang statistik dan persandian untuk pengamanan informasi;
 6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

Dengan demikian Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang adalah salah satu satuan kerja yang mempunyai peran sangat strategis, yaitu sebagai penyebar informasi pembangunan Kabupaten Jombang kepada masyarakat, juga berperan sebagai penyerap informasi timbal balik dari masyarakat kepada Pemerintah Kabupaten Jombang, penyelenggara bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan persandian.

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN JOMBANG**



Selain sumberdaya manusia juga memiliki sarana dan prasarana penunjang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, antara lain :

a. Konektivitas Jaringan Intranet

1. 54 OPD menggunakan koneksi fiber optik, dengan jumlah koneksi 87 titik;
2. 21 kecamatan menggunakan koneksi fiber optik (jaringan metro);
3. 21 kecamatan menggunakan wireless/tower, yang digunakan sebagai backup jaringan kecamatan, serta sebagai koneksi utama bagi 187 desa/kelurahan yang saat ini menggunakan koneksi wireless/tower;
4. Koneksi VPN 34 puskesmas untuk layanan SIMDA dan 306 desa/kelurahan untuk layanan Siskeudes dan Dukcapil.

b. Aplikasi dan Pusat Data

1. Ruang server dengan kapasitas 49 server fisik (termasuk 13 server cloud);
2. Hosting server untuk OPD, siskeudes penatausahaan keuangan 302 desa (Smart Desa, Web Desa dan Monev Desa);
3. Penyediaan ruang server yang sesuai standar Permenkominfo;
4. Layanan email jombangkab.go.id seluruh OPD;
5. Sarana Layanan Kegawatdaruratan Call Center 112 selama 24 jam terkait penanganan Kecelakaan, kebakaran, kerusakan, gangguan keamanan, bencana alam, maupun kondisi gawat darurat lainnya;
6. Media publikasi dengan alamat website resmi www.jombangkab.go.id sebagai portal resmi Kabupaten Jombang dan diskominfo.jombangkab.go.id sebagai website resmi Dinas Kominfo Kabupaten Jombang.

c. Komunikasi dan Informasi Publik

1. Radio Suara Jombang 94,1 FM dengan radius hingga 25 km;
2. Sarana pengaduan masyarakat melalui Lapor SP4N;
3. Layanan Informasi Publik melalui PPID;
4. Media social terkait informasi berita Pemerintah Kabupaten Jombang melalui Instagram di @pemkabjombang dan Youtube Channel : JombangkabTV;
5. Videotron sebagai layanan diseminasi informasi kepada masyarakat yang terletak di Kawasan Kebon Rojo dan Kawasan Perempatan Tugu (Jl. KH. Wachid Hasyim) Kabupaten Jombang.

F. SISTEMATIKA LAPORAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. BAB I. Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

2. BAB II. Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

3. BAB III. Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

4. BAB IV. Penutup

Bagian ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan Rencana Strategis (Renstra) yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi yang terdiri dari kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya. Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan Satuan Kerja yang landasan pelaksanaan kegiatanmya berlandaskan pada Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika 2018-2023.

Dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi melalui penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah menetapkan Rencana Strategis yang sesuai dengan Visi dan Misi Perubahan RPJMD tahun 2018-2023.

A.1 VISI DAN MISI

Visi berkaitan dengan pandangan ke depan dan menyangkut arah pelaksanaan organisasi pemerintah harus dibawa agar dapat berkarya secara konsisten, antisipasi dan produktif. Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh penyelenggara pemerintah. Adapun visi dari Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sesuai dengan Visi Pemerintah Kabupaten Jombang yang dirumuskan dengan memperhatikan Visi Bupati Jombang yang ditetapkan dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2018 – 2023 yaitu : **“Bersama Mewujudkan Jombang Berkarakter dan Berdaya Saing“**

Dalam rangka mewujudkan Visi Kabupaten Jombang tersebut maka ada 3 misi yaitu:

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Profesional;
2. Mewujudkan Masyarakat yang Berkualitas, Religius dan Berbudaya;
3. Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Daerah Berbasis Kerakyatan, Potensi Unggulan Lokal dan Industri.

Dari semua 3 misi Kepala Daerah yang dituangkan dalam misi Kabupaten Jombang salah satunya yang merupakan tanggung jawab Dinas Komunikasi dan Informatika yaitu misi – 1 yaitu **“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Profesional”**.

A.2. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan merupakan penjabaran dari misi yang merupakan hasil akhir yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 tahun. Adanya tujuan ini memfokuskan kinerja dari Dinas Komunikasi dan Informatika dan memberikan arah untuk sasaran yang diharapkan. Dinas Komunikasi dan Informatika menetapkan tujuan OPD sebagai berikut :

- 1. Meningkatkan Kualitas Layanan Publik di bidang Komunikasi dan Informatika;**
- 2. Meningkatkan Kematangan Kapabilitas Proses dan Kapabilitas Layanan SPBE;**
- 3. Meningkatkan Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi.**

Dari tujuan diatas maka Dinas Komunikasi dan Informatika menetapkan sasaran sebagai berikut:

- 1. Meningkatkan Kepuasan Masyarakat di bidang Komunikasi dan Informatika;**
- 2. Meningkatkan Kematangan Kapabilitas Proses dan Kapabilitas Layanan SPBE;**
- 3. Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah**

Dari sasaran tersebut diatas, Dinas Komunikasi dan Informatika menetapkan 5 Program, 11 Kegiatan dan 23 Sub Kegiatan sebagaimana berikut ini:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.

Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

2. Program Aplikasi Informatika

Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah
- Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik

Kegiatan Pengelolaan e-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- Penatalaksanaan dan Pengawasan e-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah
- Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik

3. Program Informasi dan Komunikasi Publik

Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- Pengelolaan Media Komunikasi Publik
- Pelayanan Informasi Publik
- Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas

4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektor

Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektor di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektor
- Membangun Metadata Statistik Sektor

5. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

Kegiatan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

- Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kabupaten

A.3. RENCANA KERJA TAHUNAN

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan Rencana Kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan Rencana Kinerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Di dalam Rencana Kinerja ditetapkan Rencana Capaian Kinerja Tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan melalui Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2021.

Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, Indikator Kinerja Sasaran, dan Rencana Capaiannya. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Dokumen perencanaan kinerja terangkum dalam Rencana kinerja tahunan (RKT). RKT merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh satuan organisasi/ kerja melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan RKT dilakukan seiring dengan agenda penyusunan program dan kebijakan anggaran oleh pimpinan satuan organisasi/ kerja yang akan dicapai pada tahun berjalan.

Penyusunan RKT meliputi sasaran strategis, sasaran program, sasaran kegiatan utama, indikator kinerja sasaran/ indikator kinerja utama (IKU), dan target yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, dengan melakukan penetapan sasaran, penyusunan indikator sasaran, dan menetapkan target.

Program – program yang telah ditetapkan pelaksanaannya dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021 di Dinas Komunikasi dan Informatika terangkum sebagai berikut :

Tabel 2.1 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021

TUJUAN	INDIKATOR	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM		
					URAIAN	INDIKATOR	TARGET
Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Indeks Kualitas Layanan Publik dibidang Komunikasi dan Informatika	Meningkatkan kepuasan masyarakat dibidang Komunikasi dan Informatika	1. Indeks Kepuasan Masyarakat di bidang Komunikasi dan Informatika 2. Indeks Pelayanan Publik di bidang Komunikasi dan Informatika	1. 83,5 (baik) 2. 61 (sedang)	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik	3.1%
					Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	1. Indeks Pelayanan Publik di bidang Komunikasi dan Informatika 2. Persentase Data Sektoral yang dipublikasikan	1. 3,52 2. 100%
					Program Penyelenggaraan Persandian	Persentase Informasi yang dilakukan pengamanan	100%
Meningkatnya kematangan kapabilitas proses dan kapabilitas layanan SPBE	Indeks SPBE layanan komunikasi dan informatika (18 indikator)	Meningkatkan kematanga kapabilitas proses dan kapabilitas layanan SPBE	Indeks SPBE layanan komunikasi dan informatika (18 indikator)	18 indikator	Program Aplikasi Informatika	1. Indeks Kematangan Teknologi Informasi dan Komunikasi 2. Indeks SPBE terkait layanan Komunikasi dan Informatika	1. Level 2 2. 18 indikator
Meningkatkan Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat daerah	Nilai Evaluasi SAKIP	78 (BB)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%

B. RENCANA KERJA

Kegiatan-kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang dilengkapi dengan indikasi pendanaan yang semuanya bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2021 sebagai berikut :

Anggaran setelah perubahan : Rp. 16.878.921.702

Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2021 ditampilkan dalam tabel sebagai berikut:

Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Ouput)	Target Capaian Kinerja 2021	Anggaran	Sumber Dana
1	2	3	6	7	8
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100 %	9.643.398.752	DAU
2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan	100 %	24.247.650	DAU
2.16.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan PD yang tersusun	3 dokumen	11.575.000	DAU
2.16.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang tersusun	5 laporan	12.619.150	DAU
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pencairan gaji dan tunjangan ASN yang tepat waktu	100 %	5.013.227.852	DAU
2.16.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika yang di fasilitasi	14 kali	4.795.738.352	DAU
2.16.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah kegiatan penyediaan honorarium pengelola keuangan	11 kegiatan	211.862.000	DAU

Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Ouput)	Target Capaian Kinerja 2021	Anggaran	Sumber Dana
1	2	3	6	7	8
2.16.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan OPD yang tersusun	1 dokumen	5.627.500	DAU
2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 %	3.550.000.000	DAU
2.16.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah penerima informasi terkait peraturan perundang-undangan di bidang cukai	450 orang	3.550.000.000	DAU
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	280.540.100	DAU
2.16.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang terfasilitasi	3 lokasi	10.151.700	DAU
2.16.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terfasilitasi	3 lokasi	32.115.000	DAU
2.16.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah penyediaan makanan dan minuman pegawai yang terfasilitasi	2 jenis	166.627.500	DAU
2.16.01.2.06.05		Jumlah pemenuhan barang cetak	4 jenis	34.342.900	DAU

Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Ouput)	Target Capaian Kinerja 2021	Anggaran	Sumber Dana
1	2	3	6	7	8
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah pemenuhan barang penggandaan	1 jenis		
2.16.01.2.06.09	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah pemenuhan bahan bacaan	3 media	9.420.000	DAU
2.16.01.2.08	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	5 kali	27.883.000	DAU
2.16.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah	100%	435.613.600	DAU
2.16.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah kegiatan penyediaan jasa komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang terfasilitasi	3 lokasi	215.000.000	DAU
2.16.01.2.09	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	5 jenis	220.613.600	DAU
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik	100 %	339.769.550	DAU
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	1 unit	98.107.050	DAU

Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Ouput)	Target Capaian Kinerja 2021	Anggaran	Sumber Dana
1	2	3	6	7	8
	Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang dibayarkan pajaknya	1 unit		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	17 unit	13.900.000	DAU
		Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dibayarkan pajaknya	17 unit		
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara	2 lokasi	29.577.500	DAU
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasara gedung kantor yang dipelihara	3 lokasi	198.185.000	DAU
	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Indeks Kematangan Teknologi Informasi Komunikasi	Level 2	3.661.105.000	DAU
		Indeks SPBE terkait layanan komunikasi dan informatika (18 indikator)	18 indikator terkelola		
	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup	Persentase Perangkat Daerah Terkoneksi Jaringan Intra Sesuai Standar Penyelenggaraan	100%	2.582.893.500	DAU

Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Ouput)	Target Capaian Kinerja 2021	Anggaran	Sumber Dana
1	2	3	6	7	8
	Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jaringan Intra Pemerintah Daerah			
		Persentase Sub domain sesuai standart Penyelenggaraan Sub Domain	67%		
	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah subdomain sesuai standar penyelenggaraan subdomain	43 subdomain	17.280.000	DAU
	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah perangkat daerah terkoneksi jaringan intra sesuai standar penyelenggaraan jaringan intra pemerintah daerah	68 titik	2.565.613.500	DAU
	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Aplikasi yang terintegrasi	20%	1.078.211.500	DAU
	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen penyelenggaraan SPBE pada aspek TIK yang disusun	4 dokumen	55.793.550	DAU
	Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan pusat data sesuai standar	20%	335.481.000	DAU

Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Ouput)	Target Capaian Kinerja 2021	Anggaran	Sumber Dana
1	2	3	6	7	8
	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah sistem elektronik dibangun/ dikembangkan	5 aplikasi	686.936.950	DAU
	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Indeks Pengelolaan informasi dan Komunikasi Publik (I-PIKP)	61 sedang	3.234.791.200	DAU
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di bidang komunikasi dan informatika	83,5 (baik)		
	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik	3,1 %	3.234.791.200	DAU
	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media publik yang dimanfaatkan untuk diseminasi informasi	5 media	812.991.000	DAU
		Jumlah program siaran radio per minggu	7 program		
	Pelayanan Informasi Publik	Prosentase permohonan informasi publik yang ditindaklanjuti sesuai SOP PPID	100%	186.410.200	DAU
		Prosentase pengaduan di SP4N LAPOR yang ditindaklanjuti	100%		

Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Ouput)	Target Capaian Kinerja 2021	Anggaran	Sumber Dana
1	2	3	6	7	8
		Jumlah desa yang terbentuk KIM baru dan dilaksanakan pembinaan	5 desa		
	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah mitra kerjasama media cetak dan elektronik informasi pembangunan daerah	45 mitra kerjasama	2.235.390.000	DAU
		Jumlah pengikut akun resmi pemerintah daerah di media sosial	12.000		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase data Sektoral yang dipublikasikan	100%	245.796.000	DAU
		Indeks Pelayanan Publik di bidang Komunikasi dan Informatika	3,51		
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen statistik sektoral Kabupaten Jombang	3 dokumen	245.796.000	DAU
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah koordinasi pengumpulan dan pengolahan data sektoral Kabupaten Jombang	9 kali	169.370.000	DAU

Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Ouput)	Target Capaian Kinerja 2021	Anggaran	Sumber Dana
1	2	3	6	7	8
	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah data statistik sektoral yang dikelola	28 data sektoral	76.426.000	DAU
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Sistem Elektronik yang berfungsi dengan baik	100%	93.830.750	DAU
	PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Sistem Elektronik yang memiliki keamanan informasi	100%	93.830.750	DAU
	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah sistem elektronik yang telah dilakukan pengamanan informasi	2 sistem elektronik	93.830.750	DAU

C. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP, dan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, dokumen Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/ perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi.

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang mempresentasikan Tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja, yaitu :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang menyusun Perjanjian Kinerja (PK) yang berisi sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sesuai dengan rencana kerja yang ditandatangani oleh Bupati Jombang. Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika setelah adanya perubahan anggaran Tahun 2021 sebagaimana berikut:

**Tabel 2.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN JOMBANG**

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatkan kepuasan masyarakat di bidang Komunikasi dan Informatika	Indeks Kualitas Layanan Publik bidang Komunikasi dan Informatika	7,69 berkualitas
2	Meningkatkan kematangan kapabilitas proses dan kapabilitas layanan SPBE	Indeks SPBE terkait layanan komunikasi dan informatika	18 indikator kriteria terkelola
3	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat daerah	Nilai Evaluasi SAKIP	78 (BB)

Sasaran Strategis		Progam	Sasaran Progam	Indikator Progam	Formulasi	Penanggung Jawab
Uraian	Indikator Kinerja Sasaran					
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	Program Penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Terlaksananya jasa pelayanan administrasi perkantoran	Persentase rata-rata Capaian Kinerja Aparatur	Jumlah jasa pelayanan administrasi perkantoran _____x100% Jumlah capaian kinerja pelayanan administrasi	Sekretariat dan Kepala Dinas Kominfo

Sasaran Strategis		Progam	Sasaran Progam	Indikator Progam	Formulasi	Penanggung Jawab
Uraian	Indikator Kinerja Sasaran					
1	2	3	4	5	6	7
					perkantoran yang telah tercapai	
Meningkatkan kepuasan masyarakat di bidang Komunikasi dan Informatika	Indeks Kualitas Layanan Publik bidang Komunikasi dan Informatika	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Meningkatnya Kualitas Layanan Informasi Publik	Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (I-PIKP)	Nilai Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (I-PIKP)	Kepala Dinas Kominfo dan Bidang Kehumasan dan Komunikasi Publik
				Indeks Kepuasan Masyarakat di bidang Komunikasi dan Informatika	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat di bidang Komunikasi dan Informatika	
		Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Tersedianya data sektoral Kabupaten Jombang	Persentase data sektoral yang dipublikasikan	Jumlah data sektoral yang ada _____ x 100% Jumlah data sektoral yang dipublikasikan	Bidang Persandian dan Statistik
				Indeks Pelayanan Publik di bidang Komunikasi dan Informatika	Nilai Indeks Pelayanan Publik di bidang Komunikasi dan Informatika	

Sasaran Strategis		Progam	Sasaran Progam	Indikator Progam	Formulasi	Penanggung Jawab
Uraian	Indikator Kinerja Sasaran					
1	2	3	4	5	6	7
		Progam Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Meningkatkan Sistem Elektronik yang berfungsi dengan baik	Persentase sistem elektronik yang berfungsi dengan baik	Jumlah sistem elektronik yang dilakukan pengamanan informasi _____ x 100 Jumlah sistem elektronik yang berfungsi dengan baik	
Meningkatkan kematangan kapabilitas proses dan kapabilitas layanan SPBE	Indeks SPBE terkait layanan komunikasi dan informatika	Program Aplikasi Informatika	Meningkatnya kematangan kapabilitas proses dan kapabilitas layanan SPBE	Indeks Kematangan Teknologi Informasi Komunikasi Indeks SPBE terkait layanan komunikasi dan informatika	Nilai Indeks Kematangan Teknologi Informasi Komunikasi Nilai Indeks SPBE terkait layanan komunikasi dan informatika	Bidang APTIKA

D. PENGUKURAN KINERJA

Pelaksanaan akuntabilitas harus dapat dinilai dengan tolok ukur pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja adalah suatu alat manajemen untuk meningkatkan mutu pengambilan keputusan dan meningkatkan akuntabilitas organisasi yang bersangkutan. Pengukuran kinerja membutuhkan artikulasi yang jelas dari misi organisasi dan dari tujuan, sasaran yang terukur.

Dalam rangka mengukur capaian indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika perlu penjabaran atas metode pengukuran. Terhadap beberapa IKU yang dicapai dengan ketersediaan dokumen akan diberikan penjelasan sederhana terhadap bentuk dokumen dan proses penyusunan dokumen tersebut. Data-data pendukung akan dilampirkan bersama dengan laporan ini.

- **Sasaran Strategis 1 : Meningkatkan kepuasan masyarakat di bidang Komunikasi dan Informatika**
 - **Indikator 1** : Indeks Kualitas Layanan Publik bidang Komunikasi dan Informatika dengan target 7,69. Untuk mewujudkan indikator ini diukur dengan Indeks Kualitas Layanan Masyarakat yang ada pada Dinas Kominfo dibagi dengan perhitungan indeks pelayanan publik. dalam pelayanan kominfo, meliputi kepuasan masyarakat terhadap layanan jaringan internet OPD, Call Center dan layanan PPID.
- **Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)**
 - **Indikator 1** : Meningkatkan kematangan kapabilitas proses dan kapabilitas layanan SPBE, dengan target 18 indikator terkelola. Untuk mewujudkan indikator ini diukur dari indikator penilaian Permenpan RB terkait SPBE dengan 47 indikator yang ada, Kominfo mengampu pada 18 indikator terkait komunikasi dan informatika.
- **Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja**
 - **Indikator 1** : Indeks Reformasi Birokrasi dengan target 78 (BB). Untuk mewujudkan indikator ini diukur dari penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SAKIP) yang dilakukan penilaian oleh Pemkab Jombang kepada Dinas Kominfo.
- **Sasaran Program :**
 - **Indikator 1 : Persentase rata-rata Capaian Kinerja Aparatur dengan target 100%.** Untuk mewujudkan indikator ini diukur dari penilaian kinerja staf Dinas Kominfo terhadap pelayanan kinerja yang ditargetkan.

- **Indikator 2 : Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (I-PIKP)** dengan target 61 (sedang). Untuk mewujudkan indikator ini diukur dari pengelolaan informasi dan komunikasi publik. yang ada pada Dinas Kominfo dengan metode survei dan interview.

dan Indeks Kepuasan Masyarakat di bidang Komunikasi dan Informatika dengan target 83,5 (baik). Untuk mewujudkan indikator ini pencapaian kinerja diukur dari pelayanan kominfo berupa jaringan internet OPD, Call Center 112 dan PPID.
- **Indikator 3 : Indeks Kematangan Teknologi Informasi dan Komunikasi** dengan target Level 2. Untuk mewujudkan indikator ini diukur dengan Perkembangan Pembangunan Kematangan TIK di Kabupaten Jombang.

dan **Indeks SPBE terkait layanan komunikasi dan informatika** dengan target 18 indikator. Untuk mewujudkan indikator ini diukur dari metode penilaian dari Permenpan RB terkait SPBE yang menetapkan 47 indikator. Dari 47 indikator Kominfo mengampu pada 18 indikator terkait SPBE.
- **Indikator 4 : Persentase data sektoral yang dipublikasikan** dengan target 100%

Untuk mewujudkan indikator ini pencapaian kinerja diukur melalui pengumpulan, mengolah, menganalisa data dan statistik daerah berupa jumlah dokumen data sektoral kabupaten jombang sebanyak 3 dokumen yaitu buku infografis sektoral, Indek Kematangan TIK dan Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (IPIKP) yang dipublikasikan 100%.
- **Indikator 5 : Persentase Sistem Elektronik yang berfungsi dengan baik** dengan target 100%.

Untuk mewujudkan indikator ini pencapaian kinerja diukur dari Jumlah sistem elektronik yang ditargetkan memiliki sistem keamanan berupa tanda tangan elektronik.

Dalam rangka evaluasi pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut:

Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

NO.	SKALA CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
1	> 100%	Sangat Baik
2	>90 - 100%	Baik
3	>60 – 90%	Cukup
4	>40 – 60%	Kurang
5	Kurang dari 40%	Sangat Kurang

Capaian Indikator kinerja berdasarkan sasaran strategis sesuai dengan Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang telah dilaksanakan secara menyeluruh melalui Program dan Kegiatan yang menjadi tanggung jawab dinas.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi yang terdiri dari berbagai komponen yg merupakan suatu kesatuan yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja.

Perencanaan Stratejik merupakan Suatu proses yg berorientasi pada hasil yg ingin dicapai dalam kurun waktu 1-5 tahun secara sistematis dan berkesinambungan. Proses ini menghasilkan suatu rencana stratejik yg memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan program yang realistis dan mengantisipasi masa depan yang diinginkan dan dapat dicapai.

Perencanaan Kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program , kebijakan, sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana stratejik. Hasil dari proses ini berupa Rencana Kinerja Tahunan.

Pada Bab ini akan disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, analisis dan evaluasi akuntabilitas kinerja, termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah yang diambil guna mengatasi hambatan/kendala dan permasalahan.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan program kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika pada tahun anggaran berkenaan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RENSTRA, visi dan misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang. Pengukuran kinerja ini, dilakukan dengan cara membandingkan antara capaian target pada indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja (PK) dengan realisasi.

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Sebagaimana disebutkan dalam Bab II, pada tahun 2021, Dinas Komunikasi dan Informatika menetapkan capaian kinerja organisasi yaitu 3 (tiga) Sasaran Strategis

dan 8 (delapan) Sasaran Program yang memuat Indikator Kinerja Utama (IKU). Pencapaian IKU tersebut ditabulasi seperti tabel berikut :

**Pencapaian Kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU)
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Tahun 2021**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan kepuasan masyarakat di bidang Komunikasi dan Informatika	Indeks Kualitas Layanan Publik bidang Komunikasi dan Informatika	7.69	7.46	97.01%
2	Meningkatkan kematangan kapabilitas proses dan kapabilitas layanan SPBE	Indeks SPBE terkait layanan komunikasi dan informatika	18 indikator	18 indikator	100%
3	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Nilai Evaluasi SAKIP	78 (BB)	80.11 (A)	102.71%
Rata – rata					99.90%

NO.	SASARAN PROGRAM	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Terlaksananya jasa pelayanan administrasi perkantoran	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Pemerintahan	100 %	100 %	100%
2	Meningkatnya Kualitas Layanan Informasi Publik	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Indeks Pengelolaan informasi dan Komunikasi Publik (I-PIKP)	61 (sedang)	81.60 (baik)	134%

NO.	SASARAN PROGRAM	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7
			Indeks Kepuasan Masyarakat di bidang Komunikasi dan Informatika	83.50 baik	85.81 baik	103%
3	Meningkatnya kematangan kapabilitas proses dan kapabilitas layanan SPBE	Program Aplikasi Informatika	Indeks Kematangan Teknologi Informasi Komunikasi	2 Level	2 Level	100%
			Indeks SPBE terkait layanan komunikasi dan informatika (18 indikator)	18 indikator kriteria terkelola	18 indikator kriteria terkelola	100%
4	Tersedianya data sektoral Kabupaten Jombang	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase data Sektoral yang dipublikasikan	100 %	100 %	100%
			Indeks Pelayanan Publik di bidang Komunikasi dan Informatika	3.51 (baik)	3.16 (baik)	90%
5	Meningkatkan Sistem Elektronik yang berfungsi dengan baik	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase Sistem Elektronik yang berfungsi dengan baik	100 %	100 %	100%
RATA-RATA						100%

Berdasarkan pada penetapan Sasaran Strategis yang juga menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU), evaluasi terhadap capaian kinerja sasaran strategis yaitu :

1. Sasaran Strategis 1 :Indeks Kualitas Layanan Publik bidang Komunikasi dan Informatika dengan target 7,69

Hasil penilaian dari Survei Kepuasan masyarakat terhadap Kualitas Layanan Publik merupakan hasil konversi dari Indeks Kualitas Masyarakat (IKM) dengan Indeks Pelayanan Publik (IPP) pada Dinas Kominfo yang dilakukan oleh Bagian Organisasi. Hasil Penilaian dari IKM dan IPP dengan teknik pengisian Kuesioner terhadap pelanggan yang telah menggunakan dan memanfaatkan layanan

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), jaringan internet OPD dan call center 112 pada Dinas Komunikasi dan Informatika yang penghitungannya melibatkan masyarakat atau pengguna layanan publik di Dinas Kominfo Kabupaten Jombang, Indeks Pelayanan Publik dilakukan penilaian oleh bagian organisasi Kabupaten Jombang. Nilai Indeks yang merepresentasikan tingkat Kualitas Layanan Publik menggunakan rumus penghitungan dari :

$$IKPP = \frac{(IKM \text{ non koversi} \times 2,5) + IPP \times 2}{2}$$

Realisasi dari Indeks Kualitas Layanan Publik adalah 7,46 tidak tercapai dari target 7,69. Indeks Kualitas Pelayanan Publik tidak tercapai dikarenakan Dinas Kominfo belum memenuhi target penilaian sarana prasarana berupa parkir kendaraan yang layak dan tidak adanya toilet laki-laki dan perempuan.

Program, kegiatan dan sub kegiatan pendukung capaian kinerja sasaran strategis 1 adalah :

- **Program Informasi dan Komunikasi Publik**

Indikator 1 : Indeks Pengelolaan informasi dan Komunikasi Publik (I-PIKP) target 61. Indikator pada penilaian program ini merupakan suatu indikator gabungan yang mengukur kinerja pengelolaan informasi dan komunikasi publik dari aspek-aspek Input, Proses, Output dan Outcome. Secara detail, dimensi Input terdiri dari Anggaran, Bahan Informasi, Sarana & Prasarana, dan Media & Saluran Komunikasi. Indeks ini diharapkan dapat dijadikan cerminan dalam meningkatkan kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik khususnya pada Pejabat Pengolaan Informasi dan Komunikasi Publik (PPID) dan Website ppid.jombangkab.go.id serta www.jombangkab.go.id.

Kategori Penilaian Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

No	Skor (%)	Keterangan Skor
1	97 - 100	INFORMATIF
2	80 - 96	Menuju INFORMATIF
3	60- 79	Cukup INFORMATIF
4	40 – 59	Kurang INFORMATIF
5	<39	TIDAK INFORMATIF

Indikator dalam Penilaian meliputi : Mengumumkan Informasi Publik, Menyediakan Informasi Publik, Pelayanan Informasi Publik dan Pengelolaan Informasi Publik. Dari hasil kuisioner penilaian empat indikator yang dilakukan diatas mengenai Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Kominfo Tahun Anggaran 2021 dicapai sebesar 81,6% yang termasuk Menuju Informatif karena berada di 80%-96%.

➤ **Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik**

Indikator kegiatan adalah Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik dan target Indikator 3,2%. Indikator pada penilaian kegiatan ini merupakan penilaian dari presentasi Jumlah Penduduk usia produktif di Kabupaten Jombang dengan Jumlah peserta sosialisasi yang ada pada dinas Kominfo.

<p>Rumus :</p> $\frac{\text{jumlah usia produktif penduduk di Kabupaten Jombang}}{\text{Jumlah sosialisasi penyebaran informasi publik yang ada di Dinas Kominfo}} \times 100\%$

**DATA SOSIALISASI PENYEBARAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2021
TERKAIT KEBIJAKAN DAN PROGRAM KEGIATAN PEMERINTAH DAERAH
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN JOMBANG**

NO	URAIAN	LOKASI	KETERANGAN
1	Dialog Interaktif Warung Pojok KebonRojo Lokal, Tema : Vaksin Aman dan Halal Masyarakat Sehat	Aula Dinas Kominfo	80 orang peserta
2	Kominfo Goes To School	SMAN 2 Jombang	75 siswa
3	Sosialisasi Lapor SP4N Goes To School	Pesantren Baitul Makmur Kecamatan Wonosalam	100 orang peserta
4	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Cukai	Desa Kwaron, Kec. Diwek dan Ds Pandan Blole Kecamatan Ploso	150 orang peserta
5	Dialog Interaktif Warung Pojok Kebonrojo Lokal. Tema : Mencegah Stunting Sejak Dini, Kenali Penyebabnya	Aula Besut Dinas Kominfo	100 orang peserta
6	Ngopi Bareng Pegiat Medsos	Pendopo Pemkab Jombang	100 orang peserta
7	Kominfo Goes To School	SMAN 1 Jombang	70 orang peserta
8	Pembinaan dan Pelatihan KIM	Desa Kwaron, Kec Diwek	50 orang peserta
		Desa Menturus, Kec. Kudu	50 orang peserta
9	Dialog Interaktif Warung Pojok Kebonrojo Lokal. Tema : Kesiapan KPU untuk	Aula Dinas Kominfo	80 orang peserta

NO	URAIAN	LOKASI	KETERANGAN
	menghadapi pemilu serentak 2024		
10	Dialog Interaktif Warung Pojok Kebonrojo Regional. Tema : Gerakan Serentak Vaksinasi Masyarakat	Desa Sentul, Kecamatan Tembelang	12.000 orang
11	Kominfo Goes To School	SMP Muhammadiyah 1 Jombang	75 orang
12	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Cukai	Desa Bendet, Kecamatan Diwek	300 orang
		Desa Ngudirejo, Kecamatan Diwek	
		Desa Bawangan, Kecamatan Ploso	
		Desa Kebon Agung, Kecamatan Ploso	
13	Dialog Interaktif Warung Pojok Kebonrojo Lokal , tema : Sinergi Pemerintah Daerah dalam pemberdayaan UMKM dimasa PANDEMI	Di AULA Dinas Kominfo tgl. 14 Oktober 2021	100 orang
14	Dialog Interaktif Warung Pojok Kebonrojo Lokal , tema : "Antisipasi Dini Pecegahan Bencana alam "	Di AULA Dinas Kominfo tgl. 10 Nopember 2021	100 orang
15	Sosialisasi Undang-undang keterbukaan Informasi Publik	Kec.Ploso tgl.7 Oktober 2021	75 orang
16	Sosialisasi Undang-undang keterbukaan Informasi Publik	Kec Jombang tgl. 8 Oktober 2021	75 orang
17	Sosialisasi Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	Tempat desa Japanan , Kec Gudo tgl. 27 Oktober 2021.	50 orang
18	Sosialisasi Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	Tempat desa Jombok , Kec Ngoro tgl. 28 Oktober 2021.	50 orang
19	Optimalisasi peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)Lingkup Pemkab Jombang.	Ruang Suro Adiningrat,tgl. 18 Nopember 2021	85 orang
20	Ngopi bareng Pegiat Medsos	Pendopo Kab.Jombang , tgl 24 Nopember 2021	100 orang
21	Pengikut di Instagram @jombang_kab	Instagram	13.700 <i>followers</i>
22	<i>Subscriber</i> di Facebook Kabupaten Jombang	Facebook	4.999 <i>subscribers</i>
23	<i>Subscriber</i> di Youtube Jombangkab TV	Youtube	2.280 <i>subscribers</i>

NO	URAIAN	LOKASI	KETERANGAN
24	Jangkauan Siaran Radio SJFM di 21 Kecamatan	Frekuensi 104.1 FM dan streaming radio online	7.650 pendengar
25	Talkshow Radio Suara Jombang FM. Tema "Literasi Media dan Sistem Pengawasan di Era Siaran Digital"	Radio SJFM	7.650 pendengar
TOTAL			50.101 orang

Jumlah penduduk usia produktif (15 tahun -64 tahun) adalah 935,692 orang, sosialisasi penyebaran informasi publik yaitu 50.101 orang. Hasil kegiatan adalah 5,35% dari target 3,1% yang ditetapkan.

Sub Kegiatan pada strategis 1 dan indikator 1 adalah :

1. Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik

Indikator 1 : Jumlah media publik yang dimanfaatkan untuk diseminasi informasi dengan target 5 media.

Indikator ini ditunjukkan dengan hasil diseminasi informasi telah disebarluaskan melalui media elektronik (TV dan radio), media cetak dan online, tatap muka atau dialog interaktif, Leaflet dan booklet dengan realisasi 5 media sesuai dengan target.

Indikator 2 : Jumlah program siaran radio per minggu dengan target 7 program.

Indikator ini ditunjukkan dengan hasil Penyebarluasan informasi radio Pemerintah Kabupaten Jombang yaitu Suara Jombang FM (SJFM) yang dikemas dalam 7 program siaran. Realisasi pada tahun 2021 yaitu 7 program siaran sesuai dengan target.

Program siaran radio dengan 7 program perhari melalui SJFM meliputi:

**PROGRAM SIAR REGULER
RADIO PUBLIK LOKAL SUARA JOMBANG FM 104,1**

Jam	Nama Program	Format Program	Komposisi
04.00	Opening & Lagu Indonesia Raya	Putar File untuk opening siaran	Pop
04.00-07.00	-Tartil 'Qur'an, Tarhim, Adzan Shubuh -Kajian Islam Pagi Suara Jombang	Putar File Pengajian KH. Djamiluddin Ahmad, Pengasuh Pondok Pesantren Al Muhibbin Tambakberas Jombang	Religi Islami

Jam	Nama Program	Format Program	Komposisi
07.00-08.00	Cakrawala sesi I	INFORMASI Siaran kata; Menghadirkan informasi lokal Jombang (politik, ekonomi, sosial, budaya); Mengundang pendengar untuk menyampaikan informasi atau berkomentar baik melalui jalur telepon, WA, atau sms; Konfirmasi dengan narasumber terkait dengan isu lokal yang sedang hangat dibicarakan.	Indonesia pertengahan (rancak)
08.00-10.00	Cakrawala Sesi II	<p>1. INFORMASI perbincangan isu nasional</p> <p>2. TALKSHOW INTERAKTIF Senin : 07.00-08.00 Dinamika Jawa Timur ; Relay Program Asosiasi LPPL Jawa Timur</p> <p>09.00-09.40 Insidental</p> <p>10.00-11.00 Nasional Is Me ; Relay Program Asosiasi LPPL, Persada.id</p> <p>Selasa : 09.00-09.40 Talkshow Anti Hoax (MAFINDO Koord. Jombang)</p> <p>10.00-10.40 PELESIR ; Talkshow Pariwisata bersama BPPD Kab. Jombang</p> <p>Rabu : 09.00-09.40 Pojok Kesehatan (Dinas Kesehatan Kab. Jombang)</p> <p>11.00-11.40 Talkshow Covid 19 bersama IDI Kab. Jombang</p> <p>Kamis : 09.00-09.40 Kiat mandiri bersama UMKM dan Enterpreneur Muda Jombang</p> <p>10.00-11.00 Talkshow Kesehatan Pulih Ekonomi Bangkit KPC PEN; Persada.id.</p> <p>Jum'at : 09.00-09.40 Halo Anak; BPPKB-PPPA</p> <p>>>> Membuka line telepon, WA atau SMS untuk interaktif pendengar</p> <p>Putar File Berita hasil produksi liputan Tim Reportase</p>	Indonesia Pertengahan (boleh slow)
10.00-12.00	Break In Time	HIBURAN Siaran kata dengan menyisipkan info info ringan seputar lifestyle, selebritis dan info info ringan lainnya. >> Putar Adzan Dhuhur sesuai dengan jadwal waktu Shalat untuk daerah Jombang dan sekitarnya dengan Hot clock yang ditetapkan	Mancanegara Easy Listening (Non Hits)
12.00 – 13.00	Jombang Interaktif	INFORMASI Dibawakan oleh satu orang announcer dibantu oleh dua orang gatekeeper. Menghadirkan tema yang beragam di setiap harinya. Tema diambil dari kebutuhan masyarakat atas informasi maupun pelayanan publik. Nara sumber dihadirkan melalui wawancara telepon dengan announcer. Jumlah nara sumber menyesuaikan dengan kebutuhan pembahasan tema. Nara sumber	

Jam	Nama Program	Format Program	Komposisi
		diambilkan dari OPD terkait atau lembaga-lembaga swasta yang berwenang untuk memberikan klarifikasi atas suatu masalah, atau berwenang untuk memberikan informasi. Nara sumber sudah dipersiapkan sebelumnya untuk bisa standby dalam rentang waktu antara 12.00 s/d 13.00. Program ini mengundang masyarakat untuk berinteraktif melalui dua jalur (telepon dan WA), untuk memberikan laporan keluhan atau komentar atas tema yang dibahas.	Manca – Indo Hits
13.00-15.00	Gayeng Marem	HIBURAN Siaran kata dengan menggunakan bahasa Jawa Jombangan; menemani pendengar beristirahat siang dengan gending dan campur sari; membuka line interaktif dengan pendengar melalui telepon, WA atau SMS. Informasi terkini lokal/nasional/Internasional (sumber: Detik.com/ Kompas/Liputan6/SS.net ,	Gending & Campur Sari
15.00-17.00	DANSA Dangdut Asyik Suara Jombang	HIBURAN Siaran Kata; menemani pendengar beraktifitas santai di sore hari' membuka line interaktif telepon, WA atau SMS	Dangdut Konvensional
17.00-18.00	Jelang Petang	- Putar File Lagu - Putar Adzan Maghrib menyesuaikan dengan jadwal waktu shalat untuk daerah Jombang dan sekitarnya - Putar Murattal	Lagu Religi
18.00-19.00	Senada indonesia POP	HIBURAN Putar File ; segmentasi anak muda; men ghadirkan tangga nada lagu teratas di setiap minggunya;	Lagu Indonesia HITS
19.00-21.00	Goyang Dangdut Malam	HIBURAN Siaran Kata; menemani pendengar beristirahat di malam hari; membuka line interaktif telepon, WA atau SMS	Dangdut Koplo Terbaru
21.00 – 22.00	Muaik Ingat-Ingat	HIBURAN Putar File ; segmentasi dewasa; men ghadirkan lagu oldies Indonesia; Pengantar istirahat malam	Lagu oldies Indonesia era 70-80an
22.00-23.00	Ngakak Bareng Kartolo	Putar File Senin – Rabu, Jum'at : Lawakan Kartolo Kamis : Shalawat Minggu : Wayang Kulit	-
23.00	Closing & Lagu Wajib Nasional	Putar file lagu untuk closing siaran	
Program PERNIK			
Menit ke-			

Jam	Nama Program	Format Program	Komposisi
00	Update Info Covid 19	Putar File yang diproduksi dan ready setiap hari	-
02	Informasi Hoax		
15	Lintas Informasi Lokal		
30	Info Korupsi KPK		
45	Lintas Informasi Nasional		

2. Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik :

- **Indikator 1 : Prosentase permohonan informasi publik yang ditindaklanjuti sesuai SOP PPID dengan target 100%.**

Indikator ini ditunjukkan dengan terselesaikannya 4 permohonan PPID pada tahun 2021 yang telah ditindaklanjuti. PPID yang ada Dinas Kominfo Kabupaten Jombang bertugas mengelola data dan informasi yang dikuasai oleh badan publik. Pengelolaan di sini meliputi pendataan, pengumpulan, pendokumentasian hingga pengarsipan. Selain pengelolaan, PPID juga bertanggungjawab untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Ada dua cara menyampaikan informasi, yaitu pertama dengan cara mengumumkan melalui media yang mudah dijangkau, dan kedua dengan cara memberikannya kepada masyarakat yang melakukan permintaan informasi.

- **Indikator 2 : Prosentase pengaduan di SP4N LAPOR yang ditindaklanjuti dengan target 100%**

Indikator ini ditunjukkan dengan hasil pengaduan di kanal SP4N LAPOR telah ditindaklanjuti dengan realisasi 100%. LAPOR! (Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat) adalah sebuah sarana aspirasi dan pengaduan berbasis media sosial yang mudah diakses dan terpadu. LAPOR! dikembangkan dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat untuk pengawasan program dan kinerja pemerintah dalam penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan publik.

Optimalisasi SP4N LAPOR dengan ditindaklanjutinya laporan ditunjang dengan sosialisasi LAPOR SP4N yang dilaksanakan oleh Dinas Kominfo.

Kegiatan dimaksudkan untuk menjemput informasi atau aduan warga atas pelayanan umum maupun pengaduan warga terhadap fasilitas umum. Selain itu juga mengenalkan pada masyarakat tentang tata cara penyampaian aduan melalui saluran yang benar dan tepat.

- **Indikator 3 : Jumlah desa yang terbentuk KIM baru dan dilaksanakan pembinaan dengan target 5 desa.**

Indikator ini ditunjukkan dengan terlaksananya Sosialisasi Kelompok Informasi Masyarakat dan pembinan Kelompok Informasi Masyarakat kepada pengurus KIM. Pada tahun 2021 telah dilaksanakan di Desa Menturus, Desa Japanan, Desa Kwaron.

Indikator Strategis 2 : Indeks Kepuasan Masyarakat di bidang Komunikasi dan Informatika dengan target 83.50 (baik)

Indikator ini ditunjukkan dengan hasil nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), yang dinilai dari kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik Diskominfo, dengan hasil nilai pada tahun 2021 sebesar 85,81 dari target 83. Pelayanan Publik yang dilakukan penilaian berupa pelayanan jaringan internet OPD, layanan call center dan layanan PPID.

- **Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral**

Indikator 1 : Persentase data Sektoral yang dipublikasikan dengan target 100%. Indikator pada program ini ditunjukkan dengan 28 data sektoral yang telah dipublikasikan di website satudata.jombangkab.go.id dengan realisasi 100%

Indikator 2 : Indeks Pelayanan Publik di bidang Komunikasi dan Informatika. Indikator pada program ini adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik yang ada di Dinas Kominfo Kabupaten Jombang dengan target 3,51. Survei yang dilakukan berupa kebijakan pelayanan, profesionalisme SDM, sarana prasarana, sistem informasi pelayanan publik (SIPP), konsultasi dan pengaduan dan inovasi pelayanan. Hasil indeks pelayanan publik tahun 2021 pada Dinas Kominfo yaitu 3,164 dengan realisasi 90,14%.

- **Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota**

Indikator Kegiatan : Jumlah dokumen statistik sektoral Kabupaten Jombang dengan target 3 dokumen. Indikator ini berupa pengumpulan Dokumen Infografis Data Sektoral, Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK) dan Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (I-PIKP) yang terealisasi sesuai target 3 dokumen.

1. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral

Indikator Jumlah koordinasi pengumpulan dan pengolahan data sektoral Kabupaten Jombang dengan target 9 kali. Untuk koordinasi terkait satu data maka telah dilakukan rapat koordinasi dan pengolahan data yang terealisasi 9 kali kegiatan.

2. Sub Kegiatan Membangun Metadata Statistik Sektoral

Indikator Sub Kegiatan : Jumlah data statistik sektoral yang dikelola dengan target 28 sektoral.

Portal Satu data Indonesia adalah kebijakan tata kelola data Pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan standar data, metadata, dan interoperabilitas data. Untuk memudahkan OPD dalam menginput data, dan memudahkan pengguna data untuk memperoleh data. Dinas Kominfo pada saat ini telah membangun aplikasi Portal Satu Data dan MOU dengan BPS Jombang dalam kemudahan pemenuhan data statistik dengan data yang dikelola adalah 28 sektoral yang realisasinya tercapai sesuai dengan target.

3. Sasaran Strategis 2 : Meningkatkan kematangan kapabilitas proses dan kapabilitas layanan SPBE dengan Indikator Indeks SPBE terkait layanan komunikasi dan informatika (18 indikator). Pada Perubahan RPJMD 2018 – 2023, Indeks SPBE merupakan target dari Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang. Dalam penilaian SPBE yang dilakukan oleh Permenpan RB, terdapat 47 indikator evaluasi SPBE. Dinas Kominfo hanya mengampu penilaian SPBE dengan 18 indikator terkait Komunikasi dan Informatika, dengan rincian sebagai berikut :

4. ASPEK	NO	INDIKATOR	OPD Pengampu
Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	1	Kebijakan Internal Arsitektur SPBE	Diskominfo
	2	Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE	Diskominfo
	3	Kebijakan Internal Manajemen Data	Diskominfo (statistik)
	4	Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi	Diskominfo (aptika)

4. ASPEK	NO	INDIKATOR	OPD Pengampu
	5	Kebijakan Internal Layanan Pusat Data	Diskominfo (aptika)
	6	Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra	Diskominfo (aptika)
	7	Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung	Diskominfo (aptika)
	8	Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi	Diskominfo (persandian)
	9	Kebijakan Internal Audit TIK	Diskominfo, aptika (infrastruktur, aplikasi) dan persandian (keamanan informasi)
	10	Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE	Diskominfo (aptika)
Teknologi Informasi dan Komunikasi	11	Pembangunan Aplikasi SPBE	Diskominfo (aptika)
	12	Layanan Pusat Data	Diskominfo (aptika)
	13	Layanan Jaringan Intra	Diskominfo (aptika)
	14	Penggunaan Sistem Penghubung	Diskominfo (aptika)
Penerapan Manajemen SPBE	15	Manajemen Keamanan	Diskominfo (persandian)
	16	Manajemen Data	Diskominfo (statistik)
Layanan Publik	17	Layanan Pengaduan	Diskominfo (HKP)
	18	Layanan Data Terbuka	Diskominfo (statistik)

Dari 18 indikator SPBE di atas tercapai sesuai dengan target.

- **PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA**

Program ini mempunyai tugas dan fungsi dalam pengembangan sistem informasi berbasis elektronik antara lain pada penyediaan internet dan fiber optic, integrasi dan pengembangan aplikasi, regulasi terkait SPBE dan tata kelola SPBE dengan memfasilitasi integrasi dan mengeluarkan rekomendasi terhadap aplikasi yang akan dibangun dan atau yang sudah dimiliki oleh OPD, terdapat 2 indikator yaitu :

Indikator 1 : Indeks Kematangan Teknologi Informasi Komunikasi dengan target level 2.

Dalam indikator ini Indeks Kematangan Teknologi Informasi Komunikasi (Indeks TIK) dilakukan penilaian untuk mengetahui pembangunan TIK, tata kelola TIK, SDM TIK dan Evaluasi TIK. Hasil Indeks TIK sesuai dengan target yaitu level 2. Dari hasil penyusunan dokumen Indeks TIK disimpulkan bahwa perlu peningkatan lebih tinggi dari infrastruktur, segi penggunaan dan keahlian SDM.

Indikator 2 : Indeks SPBE terkait layanan komunikasi dan informatika (18 indikator)

Dalam penilaian SPBE yang dilakukan oleh Permenpan RB, terdapat 47 indikator evaluasi SPBE. Dinas Kominfo hanya mengampu penilaian SPBE dengan 18 indikator terkait Komunikasi dan Informatika, dengan rincian sebagai berikut :

4. ASPEK	NO	INDIKATOR	OPD Pengampu
Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	1	Kebijakan Internal Arsitektur SPBE	Diskominfo
	2	Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE	Diskominfo
	3	Kebijakan Internal Manajemen Data	Diskominfo (statistik)
	4	Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi	Diskominfo (aptika)
	5	Kebijakan Internal Layanan Pusat Data	Diskominfo (aptika)
	6	Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra	Diskominfo (aptika)
	7	Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung	Diskominfo (aptika)
	8	Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi	Diskominfo (persandian)
	9	Kebijakan Internal Audit TIK	Diskominfo, aptika (infrastruktur, aplikasi) dan persandian (keamanan informasi)

4. ASPEK	NO	INDIKATOR	OPD Pengampu
	10	Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE	Diskominfo (aptika)
Teknologi Informasi dan Komunikasi	11	Pembangunan Aplikasi SPBE	Diskominfo (aptika)
	12	Layanan Pusat Data	Diskominfo (aptika)
	13	Layanan Jaringan Intra	Diskominfo (aptika)
	14	Penggunaan Sistem Penghubung	Diskominfo (aptika)
Penerapan Manajemen SPBE	15	Manajemen Keamanan	Diskominfo (persandian)
	16	Manajemen Data	Diskominfo (statistik)
Layanan Publik	17	Layanan Pengaduan	Diskominfo (HKP)
	18	Layanan Data Terbuka	Diskominfo (statistik)

Dari 18 indikator SPBE di atas tercapai sesuai dengan target.

➤ **Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota**

Indikator 1 : Persentase Perangkat Daerah Terkoneksi Jaringan Intra Sesuai Standar Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah dengan target 100%. Indikator ini merupakan pengembangan infrastruktur teknologi informasi yang menitik beratkan pada integrasi, fasilitasi dan penyediaan jaringan intra sesuai standar Jaringan Intra Pemerintah Daerah di Kabupaten Jombang. Pada tahun 2021 Jaringan Intra sudah terhubung pada seluruh OPD di Kabupaten Jombang.

Indikator 2 : Persentase Sub domain sesuai standart Penyelenggaraan Sub Domain dengan target 67%.

Indikator ini mengacu pada Permen Kominfo No. 5 Tahun 2015 tentang Registrar Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara bahwa domain utama di Pemerintahan Kabupaten Jombang yaitu jombangkab.go.id, sedangkan subdomain yaitu namaaplikasi/opd.jombangkab.go.id. Target 67% merupakan Penetapan Sub Domain Website Pemerintah Kabupaten Jombang, maka bagi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang yang akan membuat/membangun website atau aplikasi sistem informasi berbasis web dapat mengajukan permohonan subdomain sekaligus hosting kepada Dinas KOMINFO Kabupaten Jombang sesuai

dengan regulasi Perbup Jombang No 15 Tahun 2021 Tentang SPBE. Realiasi indikator ini yaitu 67% atau 100% dari target yang ditetapkan.

1. Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota

Indikator : Jumlah subdomain sesuai standar penyelenggaraan subdomain dengan target 43 subdomain.

Indikator ini merupakan standar Penetapan Sub Domain Website serta aplikasi Pemerintah Kabupaten Jombang, yang. Saat ini subdomain yang ada di Pemerintah Kabupaten Jombang yaitu 43 subdomain. Realiasi indikator ini tercapai 100% dari target yang ditetapkan.

2. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah

Indikator : Jumlah perangkat daerah terkoneksi jaringan intra sesuai standar penyelenggaraan jaringan intra pemerintah daerah dengan target 68 titik.

Penerapan Sistem Informasi yang ada di Pemerintah Kabupaten Jombang membutuhkan kecepatan dalam pengelolaan data dan informasi melalui infrastruktur teknologi informasi melalui koneksi jaringan intra pemerintah daerah Kabupaten Jombang. Kondisi eksisting jaringan intra fiber optic yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang yaitu ada di antar OPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Jombang, lokasi – lokasi penempatan CCTV di lokasi strategis dan lokasi – lokasi wifi gratis sebagai sarana penyebarluasan informasi pembangunan di Kabupaten Jombang yang memiliki standar penyelenggaraan jaringan intra terdapat 68 titik. Realisasi pada indikator ini yaitu 100% sesuai dengan target yang ditetapkan.

➤ **Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota**

Indikator Persentase Aplikasi yang terintegrasi dengan target 20%. Realisasi pada subkegiatan ini adalah terintegrasinya aplikasi e-sulash – SIPD, sidavid – NIK SIAK dan regmail – SIAP ASN.

1. Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

Indikator Jumlah dokumen penyelenggaraan SPBE pada aspek TIK yang disusun dengan target 4 dokumen. Realisasi pada sub kegiatan ini berupa 4 dokumen yaitu Perbup SPBE Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan SPBE Kabupaten Jombang, Keputusan Bupati Jombang Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Jombang Nomor : 188.4.45/389/415.10.1.3/2021, tanggal 4 Nopember 2021, Keputusan Bupati Jombang Nomor: 188.4.45/213/415.10.1.3/2021 Tentang Tim Koordinasi dan Tim Assesor Internal Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Tanggal 10 mei 2021 dan Dokumen Program Kerja SPBE.

2. Sub Kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah

Indikator Persentase pemenuhan pusat data sesuai standar dengan target 20%. Indikator ini merupakan standarisasi yang diberlakukan oleh Permen Kominfo terkait standar pusat data yang harus diterapkan pada lingkungan Pemerintah Daerah. Terdapat satu pusat data di Kabupaten Jombang yang dikelola oleh Dinas Kominfo. Realisasi pemenuhan pusat data sesuai dengan target yaitu 20%.

Standarisasi Pusat Data Pemerintah Daerah

NO	URAIAN	KONDISI		
		MEMENUHI	KURANG	TIDAK
1	Pusat data aman dari bencana, mudah diakses dan mudah melakukan pengembangan/pembangunan		√	
2	Perancangan dan pembangunan pusat data sesuai dengan standar topologi yang dipilih sesuai kebutuhan	√		
3	Penyediaan jalur supply utility dan logistik	√		
4	Penyediaan bandwidth untuk komunikasi yang diperlukan dan memiliki jalur alternatif guna menghindari kepadatan lintas data serta mencegah kegagalan satu jalur	√		
5	Penyediaan sistem monitoring lingkungan pusat (temperatur, kelembapan, asap, kebakaran, kebocoran air, dan tegangan listrik)	√		
6	Mempunyai dan menjalankan standar operasional prosedur untuk operasi dan perawatan	√		
7	Memiliki rencana keberlangsungan usaha dan rencana pemulihan bencana yang komprehensif serta proses pemulihan bencana yang cepat dan adaptif		√	
8	Ruang masuk yang dipakai sebagai antar-muka antara sistem pengkabelan pusat data dan pengkabelan antar bangunan	√		
9	Lokasi untuk perangkat penyedia akses dan titik demarkai dan juga antar muka dengan sistem pengkabelan	√		
10	Area distribusi utama (lokasi main cross connect, router inti dan switches untuk infrastruktur LAN dan SAN)	√		
11	Area distribusi horizontal (lokasi distribusi untuk pengkabelan ke area distribusi perangkat)	√		
12	Area distribusi perangkat (ruang yang dialokasikan untuk perangkat akhir termasuk sistem komputer dan perangkat telekomunikasi)	√		

NO	URAIAN	KONDISI		
		MEMENUHI	KURANG	TIDAK
13	Area distribusi zona (terletak antara area distribusi horizontal dan area distribusi perangkat	√		
14	Lokasi bangunan berada pada lokasi yang aman bencana alam dan mempunyai akses jalan yang cukup dan fasilitas parkir	√		
15	Bangunan ruang komputer tidak berada di bawah area perpipaan kecuali memiliki sistem pengendali air	√		
16	Jendela ruang komputer yang menghadap ke sinar matahari ditutup	√		
17	Memiliki area bongkar muat yang memadai untuk menangani penghantaran barang/peralatan	√		
18	Memiliki sistem pengkondisian udara, proteksi kebakaran, kelistrikan yang sama dengan standar ruang komputer		√	
19	Kontrol akses memiliki pengamanan fisik disetiap jendela yang memungkinkan akses langsung ke pusat data	√		
20	Setiap sumber daya manusia di pusat data memiliki pengetahuan dan kesadaran yang cukup terhadap keamanan fisik pusat data	√		
21	Pengamanan pusat data selama 24 jam dengan jumlah petugas paling sedikit 2 orang per shift		√	
22	Terdapat perangkat sistem pemantau visual yang berfungsi untuk memantau dan merekam	√		
23	Menggunakan sistem akses elektronik dan sistem pengawasan yang dikendalikan dengan mekanisme otentikasi	√		
24	Setiap tamu/pengunjung memiliki izin dan dilengkapi dengan tanda masuk serta tanda penhenal untuk dapat masuk		√	
25	Jumlah dan lokasi pintu darurat kebakaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan	√		
26	Pintu darurat kebakaran harus dapat dibuka kearah luar	√		
27	Lampu darurat dan tanda keluar diletakkan pada lokasi sesuai ketentuan		√	
28	Lampu darurat, tanda keluar darurat, dan titik kumpul darurat diletakkan pada lokasi sesuai ketentuan		√	
29	Dinding dan pintu ke ruang komputer, ruang mekanikal dan kelistrikan, ruang telekomunikasi dan kawasan kritikal lainnya memiliki tingkat terbakar (fire-rating) sesuai dengan peraturan		√	
30	Ruang komputer diproteksi dengan sistem pemadam kebakaran dan deteksi asap		√	
31	Seluruh sistem deteksi asap bangunan diintegrasikan ke satu alarm bersama		√	
32	Sistem pemadam kebakaran otomatis diaktifkan secara manua		√	
33	Tersedia catatan pemeliharaan yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan deteksi api dan pemadaman untuk keperluan pemeriksaan		√	
34	Tersedia bukti pelatihan staf pada simulasi pengendalian kebakaran		√	
35	Pemadam kebakaran ditempatkan sesuai ketentuan peraturan		√	
36	Semua tanda peringatan kebakaran ditempatkan pada posisinya sesuai ketentuan peraturan		√	
37	Seluruh sistem pendeteksi dan pemadam kebakaran didesain dan dipasang oleh petugas yang memiliki kualifikasi dan didesain sesuai standar internasional/nasional atau regulasi nasional		√	
38	Bangunan dilengkapi dengan sistem proteksi petir		√	
39	Kabel daya masuk ke dalam bangunan dan diterminasi di ruang penyambungan listrik yang andal yang berisikan seluruh penyambungan dan pengukuran yang penting		√	

NO	URAIAN	KONDISI		
		MEMENUHI	KURANG	TIDAK
40	Daya yang tersedia dari penyedia listrik utama paling sedikit 20% lebih besar dari proyeksi beban puncak dimana pusat data berada		√	
41	Tersedia catu daya listrik alternatif (seperti generator) dengan kapasitas yang memadai untuk operasional pusat data paling sedikit 6 (enam) jam selama kejadian gangguan listrik utama		√	
42	Perangkat pusat data harus diproteksi dengan UPS atau catu daya cadangan lainnya		√	
43	Kapasitas penyimpanan energi UPS atau catu daya cadangan lainnya memadai untuk memasok beban pusat data sehingga cukup waktu bagi catu daya alternatif mencapai keadaan tunak (steady state) untuk memikul beban pusat data		√	
44	Kapasitas UPS lebih besar dari proyeksi beban puncak perangkat pusat data. Kapasitas beban rata-rata tidak lebih besar dari 80% kapasitas UPS		√	
45	UPS memiliki sistem pelaporan dan pemantauan kinerja serta sistem peringatan		√	
46	Ruang pusat data memiliki terminal pembumian (grounding) tembaga kurang dari 1 Ohm	√		
47	Ruang komputer dijaga dan dikendalikan temperatur dengan suhu antara 18-24 °C	√		
48	Ruang komputer dijaga dan dikendalikan kelembaban ruangnya dengan kelembaban antara 50-55%	√		
49	Peralatan pengkondisian udara dihubungkan ke catu daya utama dan didukung oleh catu daya alternatif		√	
50	Seluruh pengkabelan interior dengan tipe tidak mudah terbakar		√	
51	Setiap rak memiliki akses ke sistem saluran kabel, di atas atau di bawahnya, yang memungkinkan kabel-kabel dapat ditata secara baik antar rak	√		
52	Kabel daya satu fase dan kabel data tembaga harus dipisahkan paling sedikit 20 (dua puluh) cm	√		
53	Kabel daya tiga fase dan kabel data tembaga harus dipisahkan paling sedikit 60 (enam puluh) cm	√		
54	Kabel yang melewati dinding dilindungi terhadap bahaya api sesuai ketentuan peraturan		√	
55	Kabel tidak diletakkan di pintu, lantai, atau digantung antar rak		√	
56	Setiap kabel memiliki label identifikasi yang unik pada kedua ujung awal dan akhir		√	
57	Setiap rak peralatan memiliki label identifikasi		√	
58	Kabel input telekomunikasi eksternal dihubungkan di area atau ruang telekomunikasi tersendiri		√	
59	Kabel komunikasi tembaga dari luar gedung diproteksi dengan peredam tegangan lebih sebelum ke ruang komputer		√	
60	Memiliki komponen kapasitas dasar dan jalur distribusi daya listrik dan sistem pendinginan yang mensuplai peralatan komputer sesuai kebutuhan		√	
61	Memiliki tingkat availability 99,671%		√	
62	Waktu layanan tidak tersedia pertahun paling banyak 28,8 jam pertahun		√	
63	Memiliki komponen kapasitas redundan dan jalur distribusi daya listrik dan sistem pendinginan yang mensuplai peralatan komputer sesuai kebutuhan		√	
64	Memiliki tingkat availability 99,749%		√	
65	Waktu layanan tidak tersedia pertahun paling banyak 22 jam pertahun		√	
66	Memiliki komponen kapasitas redundan jalur distribusi daya listrik dan sistem pendinginan yang mensuplai peralatan komputer sedemikian hingga		√	

NO	URAIAN	KONDISI		
		MEMENUHI	KURANG	TIDAK
	pemeliharaan maupun perbaikan dapat dilakukan di setiap komponen kritikal pusat data tanpa harus mematikan operasi pusat data. Satu jalur distribusi tersebut dalam kondisi aktif dan satu jalur distribusi lainnya dalam kondisi siaga (standby).			
67	Memiliki kemampuan untuk mendeteksi kegagalan, mengisolasi dampak kegagalan dan melakukan perawatan sehingga layanan pusat data tetap bekerja dengan baik		√	
68	Memiliki tingkat availability 99,982%		√	
69	Waktu layanan tidak tersedia pertahun paling banyak 1,6 jam pertahun		√	
70	Memiliki komponen kapasitas redundan dan jalur distribusi daya listrik dan sistem pendinginan yang mensuplai peralatan komputer sedemikian hingga pemeliharaan maupun perbaikan dapat dilakukan di setiap komponen kritikal pusat data tanpa harus mematikan operasi pusat data. Kedua jalur distribusi tersebut dalam kondisi aktif.		√	
71	Memiliki tingkat availability 99.995%		√	
72	Waktu layanan tidak tersedia pertahun paling banyak 2.4 menit pertahun.		√	
73	Memastikan power management berjalan dengan baik		√	
74	Memastikan desain dan manajemen aliran udara dan sistem pendingin berjalan dengan baik		√	
75	Memastikan peralatan mekanik dan elektrik bekerja pada rentang optimum operasi baik dalam hal rentang daya dan rentang temperatur		√	
76	Menggunakan peralatan TIK dan sumber daya yang sesuai dengan kebutuhan dan power density Pusat Data, dengan tetap mempertimbangkan kemungkinan pengembangan Pusat Data ke depannya		√	
77	Mengintegrasikan kontrol optimasi manajemen energi pada seluruh peralatan TIK dan keseluruhan fasilitas Pusat Data		√	

3. Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik

Indikator Jumlah sistem elektronik dibangun/ dikembangkan dengan target 5 aplikasi. Pada tahun 2021 aplikasi yang telah dibangun dan dikembangkan yaitu E-sulash, Sidavid, SPM, Simenara dan regmail

- **PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**

Indikator Persentase Sistem Elektronik yang berfungsi dengan baik.

Indikator pada program ini merupakan sistem elektronik yang ada di Kabupaten Jombang berfungsi dengan baik terkait transaksi elektronik dan pelayanan publiknya. Sistem elektronik yang ada telah berfungsi dengan baik sesuai dengan target 100%.

- **Kegiatan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi**
Indikator Persentase Sistem Elektronik yang memiliki keamanan informasi dengan target 50%

Sertifikat elektronik pada sistem elektronik merupakan salah satu cara memberikan jaminan keamanan transaksi elektronik dalam mendukung tata pemerintah yang dilaksanakan secara elektronik melalui tanda tangan elektronik yang didaftarkan pada BSSN (Badan Sandi Siber Negara). Pada Kegiatan persandian ada 4 sistem elektronik (100%) yang ditargetkan dalam dokumen Renstra 2018-2023. Target pada 2021 yaitu 50% sistem elektronik pada 2 aplikasi yaitu SIRINDUNONA dan e-Office. Realisasi pada kegiatan ini yaitu 100% sesuai dengan target.

1. Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota

Indikator Jumlah sistem elektronik yang telah dilakukan pengamanan informasi sistem elektronik dengan target 2 sistem elektronik.

Indikator pada sub kegiatan ini adalah sistem elektronik yang sudah terverifikasi tanda tangan elektronik di BSSN. Pada tahun 2021 sistem elektronik yang ditargetkan yaitu SIRINDUNONA dan e-Office. Realisasi pada subkegiatan ini yaitu 100% sesuai dengan target.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dan Tahun Lalu

Dibawah ini adalah penjabaran pencapaian sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang Tahun 2019 - 2020, akan tetapi dalam penjelasannya tidak serta merta dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dikarenakan adanya perbedaan Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2020 dan 2021 berdasarkan Permendagri 90 tahun 2019 dan Perubahan RPJMD. Berikut adalah pencapaian sasaran strategis dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang Tahun 2020 :

- **Sasaran Strategis:** Meningkatnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (2020)	Realisasi (2020)	Kategori IKU
1.	Meningkatnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks SPBE	2,6	1,6	kurang

Untuk mengetahui perbandingan pencapaian sasaran kinerja dari tahun 2019 - 2020 dan tahun 2021 diuraikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.2
Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2019 dan 2020

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target		Realisasi	
			2019	2020	2019	2020			2019	2020	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Meningkatnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks SPBE	2,6	1,8	1,4	1,6	Meningkatnya Penggunaan Sistem Informasi Daerah	Persentase perangkat daerah dan unit kerja yang mengimplementasikan IT	100%	100%	100%	100%
							Meningkatnya Komunikasi dan Informasi Pembangunan Daerah	Kategori Predikat PPID	100%	100%	100%	100%
								Persentase Informasi Publik yang disebarluaskan	100%	100%	100%	100%
							Meningkatnya Kinerja Sistem persandian daerah dan sistem kualitas pelayanan data statistik	Persentase informasi data/statistik sektoral daerah yang dikelola	100%	100%	100%	100%

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Tahun 2019	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran 2019	Target Hasil dan tahun	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020		
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2020)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2020)	Tingkat Realisasi (%) (2020)
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	22 jenis	22 jenis	22 jenis	22 jenis	100%	
2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Jumlah / jenis sarana dan prasarana gedung kantor yang diadakan	8 jenis	8 jenis	8 jenis	8 jenis	100%	
3	Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat gedung kantor/bangunan pendukungnya	Tersedianya jasa servis dan suku cadang peralatan dan perlengkapan gedung kantor	2 gedung	2 gedung	2 gedung	2 gedung	100%	
4	Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat sarana dan prasarana gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	100 unit	100 unit	100 unit	100 unit	100%	
5	Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat kendaraan dinas/kendaraan operasional	Jumlah kendaraan dinas / operasional yang dipelihara	15 unit	15 unit	15 unit	15 unit	100%	
6	Pengadaan pakaian dinas dan pakaian khusus lainnya	Jumlah pengadaan pakaian dinas dan pakaian khusus lainnya	165 stel	165 stel	6 steel	6 steel	100%	
7	Penyusunan rencana Kerja SKPD	Jumlah dokumen rencana kerja OPD tahunan sebagai rencana/program kegiatan SKPD	2 dokumen	2 dokumen	100%	100%	100%	
8	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan laporan akuntabilitas kinerja SKPD	1 dokumen	1 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Tahun 2019	Realisasi Kinerja Program Keluaran 2019	Target Hasil dan tahun	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020		
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2020)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2020)	Tingkat Realisasi (%) (2020)
1	2	3	4	5	6	7	8	
9	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Jumlah laporan keuangan OPD tepat waktu	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	
10	Penyampaian Informasi Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Cukai Kepada Masyarakat dan/atau Pemangku Kepentingan	Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi ketentuan dibidang cukai	400 orang	400 orang	150 orang	150 orang	100%	
11	Fasilitasi Publikasi Informasi Pembangunan Daerah	Jumlah dialog interaktif melalui media elektronik	24 kegiatan	24 kegiatan	5 kegiatan	5 kegiatan	100%	
12	Peningkatan Sarana dan Prasarana Radio	Radius jangkauan layanan siaran radio di Kabupaten Jombang	10 km	10 km	20 km	20 km	100%	
13	Fasilitasi Pengelolaan Pelayanan Informasi	Jumlah OPD yang mengikuti kegiatan pelatihan lapor SP4N	75 OPD	75 OPD	75 OPD	75 OPD	100%	
14	Fasilitasi Kelompok Informasi Masyarakat	Jumlah KIM yang terbentuk di setiap desa	5 desa	5 desa	5 desa	0 desa	100%	
15	Fasilitasi Pengembangan Koneksi Jaringan	1)Persentase OPD yang ditingkatkan kualitas dan layanan koneksi pengembangan jaringan	67%	67%	100%	100%	100%	
16	Fasilitasi Pengembangan Koneksi Jaringan	(2) Jumlah penambahan titik koneksi jaringan diarea public	3 titik	3 titik	10 titik	10 titik	100%	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Tahun 2019	Realisasi Kinerja Program Keluaran 2019	Target Hasil dan tahun	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020		
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2020)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2020)	Tingkat Realisasi (%) (2020)
1	2	3	4	5	6	7	8	
17	Pemeliharaan rutin/berkala koneksi jaringan	Persentase koneksi jaringan OPD yang terpelihara	100%	100%	100%	100%	100%	
18	Fasilitasi Pengelolaan Data Center dan Disaster Recovery Center (DRC)	Jumlah data center yang terbentuk	1 data center	1 data center	1 data center	2 data center	100%	
19	Fasilitasi Pengelolaan Integrasi Data	Jumlah data aplikasi yang terintegrasi	3 data aplikasi	3 data aplikasi	3 jenis	3 jenis	100%	
20	Fasilitasi Pengembangan Aplikasi dan Ekosistem e-Government	Jumlah aplikasi/website OPD yang telah diberikan nama sub domain Jombangkab.go.id	7 subdomain	14 subdomain	7 subdomain	19 subdomain	100%	
21	Fasilitasi Tata Kelola e-Government	Jumlah dokumen konsultasi	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	
22	Penyusunan dan Pengumpulan data dan statistik daerah	Jumlah dokumen data sektoral kabupaten jombang	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%	
23	Fasilitasi Penyelenggaraan Persandian Daerah	Jumlah komunikasi berita sandi yang diteruskan kepada instansi penerima	396 berita	396 berita	396 berita	412 berita	100%	

Realisasi Kinerja Tahun 2021

Sasaran Strategis	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Ouput)	Target Kinerja Capaian Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran tahun 2021
1	2	3	4	5
Meningkatkan kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan	100%	100%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan PD yang tersusun	3 dokumen	3 dokumen
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang tersusun	3 laporan	3 laporan
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pencairan gaji dan tunjangan ASN yang tepat waktu	100%	100%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika yang di fasilitasi	14 kali	14 kali
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah kegiatan penyediaan honorarium pengelola keuangan	11 kegiatan	11 kegiatan

Sasaran Strategis	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Ouput)	Target Kinerja Capaian Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran tahun 2021
1	2	3	4	5
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan OPD yang tersusun	1 dokumen	1 dokumen
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	100%
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah penerima informasi terkait peraturan perundang-undangan di bidang cukai	450 orang	450 orang
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang terfasilitasi	3 lokasi	3 lokasi
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terfasilitasi	3 lokasi	3 lokasi
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah penyediaan makanan dan minuman pegawai yang terfasilitasi	2 jenis	2 jenis
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah pemenuhan barang cetak	4 jenis	4 jenis
		Jumlah pemenuhan barang penggandaan	1 jenis	1 jenis
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah pemenuhan bahan bacaan	3 media	3 media
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	2 kali	2 kali

Sasaran Strategis	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Ouput)	Target Kinerja Capaian Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran tahun 2021
1	2	3	4	5
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah kegiatan penyediaan jasa komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang terfasilitasi	3 lokasi	3 lokasi
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	5 jenis	5 jenis
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik	100%	100%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	1 unit	1 unit
		Jumlah kendaraan dinas jabatan yang dibayarkan pajaknya	1 unit	1 unit
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang terpelihara	17 unit	17 unit
		Jumlah kendaraan dinas/operasional dibayarkan pajaknya	17 unit	17 unit
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara	2 lokasi	2 lokasi
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasara gedung kantor yang dipelihara	3 lokasi	3 lokasi

Sasaran Strategis	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Ouput)	Target Kinerja Capaian Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran tahun 2021
1	2	3	4	5
Meningkatkan kualitas layanan publik dibidang Kominfo	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Indeks Pengelolaan informasi dan Komunikasi Publik (I-PIKP)	61 (sedang)	81.60 (baik)
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di bidang komunikasi dan informatika	83,5 (baik)	85,81 (baik)
	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik	100%	100%
	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media publik yang dimanfaatkan untuk diseminasi informasi	5 media	5 media
		Jumlah program siaran radio per minggu	7 program	7 program
	Pelayanan Informasi Publik	Prosentase permohonan informasi publik yang ditindaklanjuti sesuai SOP PPID	100%	100%
		Prosentase pengaduan di SP4N LAPOR yang ditindaklanjuti	100%	100%
		Jumlah desa yang terbentuk KIM baru dan dilaksanakan pembinaan	5 desa	5 desa
	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah mitra kerjasama media cetak dan elektronik informasi pembangunan daerah	45 mitra kerjasama	45 mitra kerjasama
		Jumlah pengikut akun resmi pemerintah daerah di media sosial	12.000 pengikut	12.000 pengikut

Sasaran Strategis	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Ouput)	Target Kinerja Capaian Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran tahun 2021
1	2	3	4	5
Meningkatkan kematangan kapabilitas proses dan kapabilitas layanan SPBE	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Indeks Kematangan Teknologi Informasi Komunikasi	Level 2	Level 2
		Indeks SPBE terkait layanan komunikasi dan informatika (18 indikator)	18 indikator terkelola	18 indikator terkelola
	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Perangkat Daerah Terkoneksi Jaringan Intra Sesuai Standar Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	100%	100%
		Persentase Sub domain sesuai standart Penyelenggaraan Sub Domain	100%	100%
	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah subdomain sesuai standar penyelenggaraan subdomain	43 subdomain	43 subdomain
	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah perangkat daerah terkoneksi jaringan intra sesuai standar penyelenggaraan jaringan intra pemerintah daerah	68 titik	68 titik
	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Aplikasi yang terintegrasi	20%	20%
	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen penyelenggaraan SPBE pada aspek TIK yang disusun	4 dokumen	4 dokumen

Sasaran Strategis	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Ouput)	Target Kinerja Capaian Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran tahun 2021
1	2	3	4	5
	Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan pusat data sesuai standar	20%	20 %
	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah sistem elektronik dibangun/ dikembangkan	5 aplikasi	5 aplikasi
Meningkatkan kualitas layanan publik dibidang Kominfo	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase data Sektoral yang dipublikasikan	100%	100%
		Indeks Pelayanan Publik di bidang Komunikasi dan Informatika	3,51	3,16
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen statistik sektoral Kabupaten Jombang	3 dokumen	3 dokumen
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah koordinasi pengumpulan dan pengolahan data sektoral Kabupaten Jombang	9 kali	9 kali
	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah data statistik sektoral yang dikelola	28 data sektoral	28 data sektoral
Meningkatkan kematangan kapabilitas proses dan	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Sistem Elektronik yang berfungsi dengan baik	100%	100%
		Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan informasi	Persentase Sistem Elektronik yang memiliki keamanan informasi	50%

Sasaran Strategis	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Ouput)	Target Kinerja Capaian Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran tahun 2021
1	2	3	4	5
kapabilitas layanan SPBE	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah sistem elektronik yang telah dilakukan pengamanan informasi	2 sistem elektronik	2 sistem elektronik

5. Analisis Penyebab Keberhasilan dalam pencapaian Kinerja pada Tahun 2021

- Telah dilakukannya MOU dengan BPS terkait satu data di Kabupaten Jombang. Kominfo sebagai walidata, BPS sebagai Pembina dan OPD sebagai produsen data;
- Tersedianya pusat data pada Tahun 2021 melalui website satudata.jombangkab.go.id. Pusat data terbentuk pada tahun 2021 melalui website satudata.jombangkab.go.id. Data yang tersedia meliputi 28 data urusan yaitu : data pangan, energi, infrastruktur, maritim, pendidikan, kesehatan, pendidikan, ekonomi, industri, pariwisata, dan reformasi birokrasi pada tahun 2014-2018.
- Pembangunan aplikasi integrasi data pada Jombang Command Center yang meliputi data perencanaan, realisasi anggaran, harga pangan, kependudukan, satu peta, layanan pengaduan, layanan kesehatan, rumah tangga miskin (RTM), smart desa, kepegawaian, dan satu data. Jombang Command Center merupakan monitoring room (ruangan monitor) yang berfungsi sebagai ruang meeting Kepala Daerah dan koordinasi untuk membantu memastikan setiap keputusan penting, respon dan aksi yang diambil seakurat mungkin yang ditampilkan sesuai data yang ada pada aplikasi di video wall;
- Pengembangan Ruang Server di Dinas Kominfo pada Tahun 2021. OPD yang memiliki server diharapkan untuk menitipkan server pada Diskominfo untuk kemudahan dalam pengintegrasian dan keamanan data;
- SDM Tenaga Ahli Programmer sebanyak 6 orang pada Dinas Kominfo
- Tersedianya Anggaran;
- Komitmen bersama pada sejumlah OPD di kabupaten Jombang sesuai dengan indikator SPBE;
- Telah dilakukannya pendaftaran sertifikat elektronik di BSSN sebagai keamanan sistem informasi aplikasi di Kabupaten Jombang

Analisis Kegagalan/Permasalahan/Kendala/Solusi dalam Pencapaian Kinerja

Dalam melaksanakan sasaran Kinerja ditemukan permasalahan antara lain :

- OPD masih membangun aplikasi sendiri tanpa berkoordinasi dengan Dinas Kominfo Jombang;
- Masih banyak aplikasi OPD yang tidak bisa diintegrasikan dengan aplikasi lainnya dari pusat maupun daerah;
- Kurangnya SDM berkompetensi staf Teknologi Informasi di setiap OPD;
- Masih sulitnya pemenuhan data sektoral pada OPD;

- Belum adanya arsitektur SPBE yang sesuai dengan amanat Permenpan RB

Upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut :

- Kewajiban setiap OPD untuk melakukan koordinasi dengan Diskominfo sebelum pembangunan/pengembangan aplikasi dan infrastruktur SPBE dan penganggaran terkait sarana dan prasarana TIK;
- Kegiatan rapat rutin monitoring dan evaluasi SPBE dan review arsitektur SPBE setiap tahun;
- Pembinaan Kompetensi Staf Teknologi Informasi di setiap OPD.
- Penyusunan Arsitektur SPBE sesuai dengan amanat Permenpan RB

6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Peningkatan kinerja pada Dinas Kominfo Kabupaten Jombang didukung oleh sumberdaya, baik sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana yang memadai. Pemenuhan dan penggunaan sumber daya tentu sangat berkaitan erat dengan Sumber Dana (Anggaran). Dalam setiap pelaksanaan kegiatan penunjang kinerja Dinas Kominfo Kabupaten Jombang melakukan beberapa analisis dan efisiensi dalam pemenuhan dan penggunaan sumber daya maupun sumber dana.

Efisiensi merupakan bentuk penghematan terhadap anggaran tanpa mengurangi hasil maupun capaian kinerja. Efisiensi didapat dari rata-rata capaian kinerja dikurangi presentase realisasi anggaran Dinas Kominfo Kabupaten Jombang. Adapun realisasi Anggaran Dinas Kominfo Jombang adalah sebesar 1.379.642.637 atau 8.17% sebesar dari pagu anggaran sebesar Rp. 16.878.921.702 Sedangkan rata-rata capaian kinerja Dinas Kominfo Kabupaten Jombang adalah sebesar 100%.

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	APBD	Penyerapan Anggaran (%)	Efisiensi Anggaran	Persentase Tingkat Efisiensi %
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	16.878.921.702,00	15.499.279.065,00	1.379.642.637,00	8,17%
Komunikasi dan Informatika	16.539.294.952,00	15.178.117.573,00	1.361.177.379,00	8,23%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9.643.398.752,00	8.580.168.713,00	1.063.230.039,00	11,03%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24.247.650,00	24.172.500,00	75.150,00	0,31%

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	APBD	Penyerapan Anggaran (%)	Efisiensi Anggaran	Persentase Tingkat Efisiensi %
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11.628.500,00	11.575.000,00	53.500,00	0,46%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12.619.150,00	12.597.500,00	21.650,00	0,17%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.013.227.852,00	4.197.153.449,00	816.074.403,00	16,28%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.795.738.352,00	4.006.220.873,00	789.517.479,00	16,46%
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	211.862.000,00	185.339.676,00	26.522.324,00	12,52%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.627.500,00	5.592.900,00	34.600,00	0,61%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3.550.000.000,00	3.422.818.070,00	127.181.930,00	3,58%
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	3.550.000.000,00	3.422.818.070,00	127.181.930,00	3,58%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	280.540.100,00	248.246.469,00	32.293.631,00	11,51%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.151.700,00	7.075.500,00	3.076.200,00	30,30%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	32.115.000,00	32.102.200,00	12.800,00	0,04%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	166.627.500,00	142.678.821,00	23.948.679,00	14,37%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	34.342.900,00	34.340.000,00	2.900,00	0,01%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9.420.000,00	9.350.000,00	70.000,00	0,74%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	27.883.000,00	22.699.948,00	5.183.052,00	18,59%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	435.613.600,00	398.335.795,00	37.277.805,00	8,56%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	215.000.000,00	178.821.145,00	36.178.855,00	16,83%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	220.613.600,00	219.514.650,00	1.098.950,00	0,50%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	339.769.550,00	289.442.430,00	50.327.120,00	14,81%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	98.107.050,00	71.310.630,00	26.796.420,00	27,31%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	13.900.000,00	7.466.800,00	6.433.200,00	46,28%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	29.577.500,00	29.457.000,00	120.500,00	0,41%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	198.185.000,00	181.208.000,00	16.977.000,00	8,57%

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	APBD	Penyerapan Anggaran (%)	Efisiensi Anggaran	Persentase Tingkat Efisiensi %
Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	3.234.791.200,00	3.137.942.453,00	96.848.747,00	2,99%
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	3.234.791.200,00	3.137.942.453,00	96.848.747,00	2,99%
Pengelolaan Media Komunikasi Publik	812.991.000,00	776.491.000,00	36.500.000,00	4,49%
Pelayanan Informasi Publik	186.410.200,00	160.534.250,00	25.875.950,00	13,88%
Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	2.235.390.000,00	2.200.917.203,00	34.472.797,00	1,54%
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	3.661.105.000,00	3.460.006.407,00	201.098.593,00	5,49%
Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.582.893.500,00	2.438.117.627,00	144.775.873,00	5,61%
Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	17.280.000,00	16.785.000,00	495.000,00	2,86%
Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	2.565.613.500,00	2.421.332.627,00	144.280.873,00	5,62%
Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.078.211.500,00	1.021.888.780,00	56.322.720,00	5,22%
Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	55.793.550,00	54.732.500,00	1.061.050,00	1,90%
Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	335.481.000,00	314.423.000,00	21.058.000,00	6,28%
Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	686.936.950,00	652.733.280,00	34.203.670,00	4,98%
Statistik	245.796.000,00	238.797.582,00	6.998.418,00	2,85%
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	245.796.000,00	238.797.582,00	6.998.418,00	2,85%
Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	245.796.000,00	238.797.582,00	6.998.418,00	2,85%
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	169.370.000,00	163.876.500,00	5.493.500,00	3,24%
Membangun Metadata Statistik Sektoral	76.426.000,00	74.921.082,00	1.504.918,00	1,97%
Persandian	93.830.750,00	82.363.910,00	11.466.840,00	12,22%

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	APBD	Penyerapan Anggaran (%)	Efisiensi Anggaran	Persentase Tingkat Efisiensi %
Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	93.830.750,00	82.363.910,00	11.466.840,00	12,22%
Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	93.830.750,00	82.363.910,00	11.466.840,00	12,22%
Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	93.830.750,00	82.363.910,00	11.466.840,00	12,22%
	16.878.921.702,00	15.499.279.065,00	1.379.642.637,00	8,17%

Penurunan efisiensi di tahun 2021 merupakan salah satu dampak dari adanya pandemic Covid-19. Di tahun 2021, dilaksanakan pemotongan/refocusing anggaran untuk dana penanggulangan Covid-19 Di Kabupaten Jombang.

B. REALISASI ANGGARAN

APBD Kabupaten Jombang Tahun 2021 untuk Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang sebesar 16,878,921,702 (Enam Belas Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Dua Rupiah).

Realisasi penyerapan anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai berikut :

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	APBD	Realisasi	Persentase
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	16,878,921,702.00	15,499,279,065.00	91.83%
Komunikasi dan Informatika	16,539,294,952.00	15,178,117,573.00	91.77%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9,643,398,752.00	8,580,168,713.00	88.97%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24,247,650.00	24,172,500.00	99.69%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11,628,500.00	11,575,000.00	99.54%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12,619,150.00	12,597,500.00	99.83%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5,013,227,852.00	4,197,153,449.00	83.72%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4,795,738,352.00	4,006,220,873.00	83.54%
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	211,862,000.00	185,339,676.00	87.48%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5,627,500.00	5,592,900.00	99.39%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3,550,000,000.00	3,422,818,070.00	96.42%
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	3,550,000,000.00	3,422,818,070.00	96.42%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	280,540,100.00	248,246,469.00	88.49%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10,151,700.00	7,075,500.00	69.70%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	32,115,000.00	32,102,200.00	99.96%

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	APBD	Realisasi	Persen tase
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	166,627,500.00	142,678,821.00	85.63%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	34,342,900.00	34,340,000.00	99.99%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9,420,000.00	9,350,000.00	99.26%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	27,883,000.00	22,699,948.00	81.41%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	435,613,600.00	398,335,795.00	91.44%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	215,000,000.00	178,821,145.00	83.17%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	220,613,600.00	219,514,650.00	99.50%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	339,769,550.00	289,442,430.00	85.19%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	98,107,050.00	71,310,630.00	72.69%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	13,900,000.00	7,466,800.00	53.72%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	29,577,500.00	29,457,000.00	99.59%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	198,185,000.00	181,208,000.00	91.43%
Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	3,234,791,200.00	3,137,942,453.00	97.01%
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	3,234,791,200.00	3,137,942,453.00	97.01%
Pengelolaan Media Komunikasi Publik	812,991,000.00	776,491,000.00	95.51%
Pelayanan Informasi Publik	186,410,200.00	160,534,250.00	86.12%
Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	2,235,390,000.00	2,200,917,203.00	98.46%
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	3,661,105,000.00	3,460,006,407.00	94.51%
Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2,582,893,500.00	2,438,117,627.00	94.39%
Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	17,280,000.00	16,785,000.00	97.14%
Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	2,565,613,500.00	2,421,332,627.00	94.38%
Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1,078,211,500.00	1,021,888,780.00	94.78%
Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	55,793,550.00	54,732,500.00	98.10%
Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	335,481,000.00	314,423,000.00	93.72%
Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	686,936,950.00	652,733,280.00	95.02%
Statistik	245,796,000.00	238,797,582.00	97.15%
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	245,796,000.00	238,797,582.00	97.15%
Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	245,796,000.00	238,797,582.00	97.15%
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	169,370,000.00	163,876,500.00	96.76%
Membangun Metadata Statistik Sektoral	76,426,000.00	74,921,082.00	98.03%

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	APBD	Realisasi	Persen tase
Persandian	93,830,750.00	82,363,910.00	87.78%
Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	93,830,750.00	82,363,910.00	87.78%
Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	93,830,750.00	82,363,910.00	87.78%
Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	93,830,750.00	82,363,910.00	87.78%
	16,878,921,702.00	15,499,279,065.00	91.83%

Tabel 3.4 Capaian Indikator Sasaran RPJMD Tahun 2021

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Tahun 2021	Target	Realisasi
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks SPBE	2,60	2,51

Perubahan RPJMD yaitu Indeks SPBE diampu oleh Sekretariat Daerah dan beberapa OPD. Dinas Kominfo mengampu pada 18 indikator yaitu :

ASPEK	NO	INDIKATOR	BOBOT	Opd pengampu
Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	1	Kebijakan Internal Arsitektur SPBE	1,30	diskominfo
	2	Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE	1,30	diskominfo
	3	Kebijakan Internal Manajemen Data	1,30	Diskominfo (statistik)
	4	Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi	1,30	Diskominfo, aptika
	5	Kebijakan Internal Layanan Pusat Data	1,30	Diskominfo , aptika
	6	Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra	1,30	Diskominfo , aptika
	7	Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung	1,30	Diskominfo , aptika
	8	Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi	1,30	Diskominfo, persandian

ASPEK	NO	INDIKATOR	BOBOT	Opd pengampu
	9	Kebijakan Internal Audit TIK	1,30	Diskominfo aptika(infrastruktur , aplikasi) dan persandian(keamanan informasi)
	10	Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE	1,30	Kominfo
Perencanaan Strategis SPBE	11	Arsitektur SPBE	2,50	Bappeda
	12	Peta Rencana SPBE	2,50	Bappeda
	13	Keterpaduan Rencana dan Anggaran	2,50	Bappeda, BPKAD, Kominfo
	14	Inovasi Proses Bisnis	2,50	Bagor
Teknologi Informasi dan Komunikasi	15	Pembangunan Aplikasi SPBE	2,50	Diskominfo, aptika
	16	Layanan Pusat Data	2,50	Diskominfo, aptika
	17	Layanan Jaringan Intra	2,50	Diskominfo, aptika
	18	Penggunaan Sistem Penghubung	2,50	Diskominfo, aptika
Penyelenggara SPBE	19	Tim Koordinasi SPBE	2,50	Bagor
	20	Kolaborasi Penerapan SPBE	2,50	Bappeda
Penerapan Manajemen SPBE	21	Manajemen Risiko	1,50	Inspektorat
	22	Manajemen Keamanan	1,50	Diskominfo, persandian
	23	Manajemen Data	1,50	Diskominfo (statistik)
	24	Manajemen Aset TIK	1,50	BPKAD, aset
	25	Kompetensi SDM	1,50	BKD PP
	26	Manajemen Pengetahuan	1,50	Bagor
	27	Manajemen Perubahan	1,50	Bagor
	28	Manajemen Layanan SPBE	1,50	Bagor
Pelaksanaan Audit TIK	29	Audit Infrastruktur	1,50	Inspektorat, kominfo
	30	Audit Aplikasi	1,50	Inspektorat, kominfo
	31	Audit Keamanan	1,50	Inspektorat, kominfo
	32	Layanan Perencanaan	2,75	Bappeda
	33	Layanan Penganggaran	2,75	BPKAD

ASPEK	NO	INDIKATOR	BOBOT	Opd pengampu
Layanan	34	Layanan Keuangan	2,75	BPKAD
Administrasi Pemerintahan	35	Layanan Pengadaan Barang/Jasa	2,75	PBJ
	36	Layanan Kepegawaian	2,75	BKD PP
	37	Layanan Kearsipan Dinamis	2,75	Dispersip
	38	Layanan Pengelolaan BMD	2,75	BPKAD
	39	Layanan Pengawasan Internal	2,75	Inspektorat
	40	Layanan Akuntabilitas Kinerja	2,75	Bagor
	41	Layanan Kinerja Pegawai	2,75	Bagor
Layanan Publik	42	Layanan Pengaduan	3,00	Diskominfo, HKP
	43	Layanan Data Terbuka	3,00	Diskominfo (statistik)
	44	Layanan JDIH	3,00	Bag. Hukum
	45	Layanan Publik Sektor 1	3,00	DPMPTSP
	46	Layanan Publik Sektor 2	3,00	Bapenda
	47	Layanan Publik Sektor 3	3,00	Dinsos
Jumlah			100	

Hasil Evaluasi Sasaran RPJMD yaitu pada penilaian SPBE Tahun 2021 yang dilakukan oleh Kemenpan RB. Hasil SPBE pada tahun 2021 yaitu 2,51 dengan hasil Cukup. Ke depan menjadi evaluasi kita bersama bahwa dalam pencapaian target SPBE dibutuhkan komitmen bersama atau dukungan secara menyeluruh dari OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Jombang untuk melaksanakan SPBE serta diperlukan revisi target Renstra RPJMD pada Tahun 2023 yaitu 3,6.

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang Tahun 2021 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan dalam rangka pencapaian Visi dan Misi selama anggaran Tahun 2021. Laporan ini merupakan implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan Sasaran Strategis Tahun 2021 dengan pencapaian Indikator kinerja pendukungnya, dapat disimpulkan yaitu : 1). Indikator Kinerja Indeks Kualitas Layanan Publik bidang Komunikasi dan Informatika **sangat berhasil**; 2). Indikator Indeks SPBE terkait layanan komunikasi dan informatika **sangat berhasil**; 3) Indikator Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat daerah **sangat berhasil**

Sebagai salah satu satuan kerja di lingkup Pemerintah Kabupaten Jombang, Dinas Komunikasi dan Informatika telah mampu menjalankan tugasnya dengan baik, hal ini tampak pada pencapaian indikator kinerja pendukung IKU pada tahun 2021 sudah sesuai target yang ditetapkan.

Akhirnya dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait mengenai tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Secara internal Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) tersebut harus dijadikan motivator untuk lebih meningkatkan kinerja sehingga Dinas Komunikasi dan Informatika dapat semakin dirasakan keberadaannya oleh masyarakat dengan pelayanan yang profesional.

Selain itu Laporan Kinerja ini diharapkan mampu menjadi acuan untuk terus melakukan inovasi dan memperbaiki kinerja aparatur sesuai dengan Visi Kabupaten Jombang, yaitu "**Bersama Mewujudkan Jombang Berkarakter dan Berdaya Saing**".

Jombang, 3 Januari 2022

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN JOMBANG**

BUDI WINARNO, ST, MSi

Pembina Tk. I

NIP. 19741001 199901 1 001